

**SKRIPSI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR  
RETRIBUSI PARKIR**

**(Studi di Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kabupaten Ponorogo)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FITRI YULIANI**

**NIM. 125010101111109**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR  
RETRIBUSI PARKIR**

**(Studi di Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kabupaten Ponorogo)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FITRI YULIANI**

**NIM. 125010101111109**

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** :UPAYA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DARI SEKTOR  
RETRIBUSI PARKIR (STUDI DI  
DINAS PERHUBUNGAN DAN  
DPPKAD KABUPATEN PONOROGO)

**Identitas Penulis**

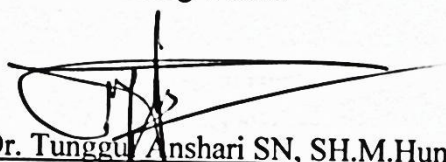
a. Nama : Fitri Yuliani  
b. NIM : 125010101111109

**Konsentrasi** : Hukum Administrasi Negara

**Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan

**Disetujui pada tanggal** : 17 DEC 2018

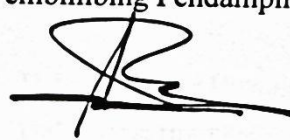
**Pembimbing Utama**



Dr. Tunggul Anshari SN, SH.M.Hum

NIP. 19590524 198601 1 001

**Pembimbing Pendamping**

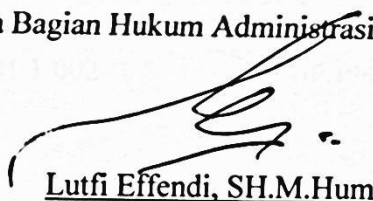


Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Lutfi Effendi, SH.M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN

### UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR

(Studi di Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kabupaten Ponorogo)

Oleh:

**FITRI YULIANI**

**NIM. 125010101111109**

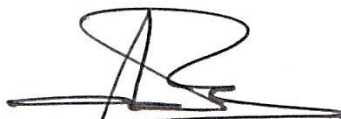
Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **17 DEC 2018**

Pembimbing Utama



Dr. Tunggul Anshari SN, SH.M.Hum  
NIP. 19590524 198601 1 001

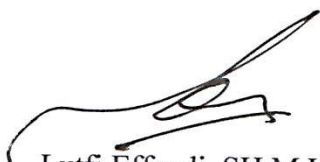
Pembimbing Pendamping



Agus Yulianto, SH.MH  
NIP. 19590717 198601 1 001

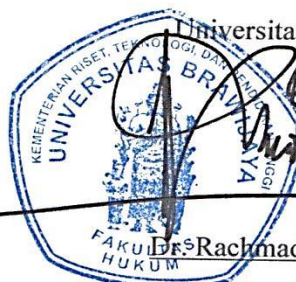
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum  
Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH.M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya



Dr. Rachmad Safa'at SH. M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Fitri Yuliani

NIM : 125010101111109

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 24 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Fitri Yuliani

NIM. 12501010111110

## MOTTO

*“ Ilmu adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat, bukan hanya untuk dihafal ”*  
( Imam Syafi’I )

*“ Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak biasa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Titik!”*  
( Chris Gardner )

*“ Berjalan dengan perlahan akan dapat melihat lebih luas, lebih banyak hal dan detail namun berjalan dengan cepat yang dilihat terbatas. Lalu mana yang menemukan sesuatu yang lebih dan dapat berkembang? Menurutku seseorang yang berjalan perlahan dan yang banyak melihat ”*  
(Fitri Yuliani)

*“Pengalaman selalu memberikan suatu ujian terlebih dahulu kemudian memberi pelajaran, ia guru terkejam ”*  
(Fitri Yuliani)



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbil'alamin tercurah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia- Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir” (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kabupaten Ponorogo”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

3. Bapak Dr. Tunggul Anshari, SH. M. Hum selaku dosen pembimbing pertama skripsi yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis
4. Bapak Agus Yulianto SH. MH selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan ilmunya kepada penulis
5. Pembimbing selama penelitian di BKD Kabupaten Ponorogo Bapak Wong Prasaja, S. Sos, Bapak Djunaedi, SH. MM, Bapak Muhammad Iqbal Ardiansyah yang memberikan bimbingan, informasi dan ilmunya yang mendukung penelitian Tugas Akhir/ Skripsi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
6. Ayahanda Sadikin dan Ibunda Sukarmi yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan tidak lupa do'anya yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik
7. Kakak- kakak saya yang selalu mendukung saya baik moral materiilnya dan juga do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Untuk suami saya yang selalu mendukung, memotivasi, mendampingi, mendo'akan dan berbagi pemikiran, saran atau ilmunya setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
9. Serta kerabat-kerabat dekat dan rekan-rekan seperjuangan yang penulis banggakan yang tidak dapat ditulis satu persatu dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.



Untuk semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semua nya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir/skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan oleh penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Malang, 24 Oktober 2018

Fitri Yuliani

NIM. 125010101111109

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Tulisan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
Ringkasan .....	xiii
Summary .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Upaya .....	11
B. Definisi Pemerintah.....	11
C. Pendapatan Asli Daerah .....	12
D. Retribusi Daerah.....	19
E. Retribusi Parkir .....	28
F. Pajak.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	44

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo .....	48
B. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo .....	50
C. Peraturan yang Digunakan Dalam Perparkiran Kabupaten Ponorogo.....	53
D. Hasil Penelitian .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur dan besar tariff retribusi parkir di tepi jalan umum.....57

Table 1.2 Tarif parkir tempat khusus parkir .....59



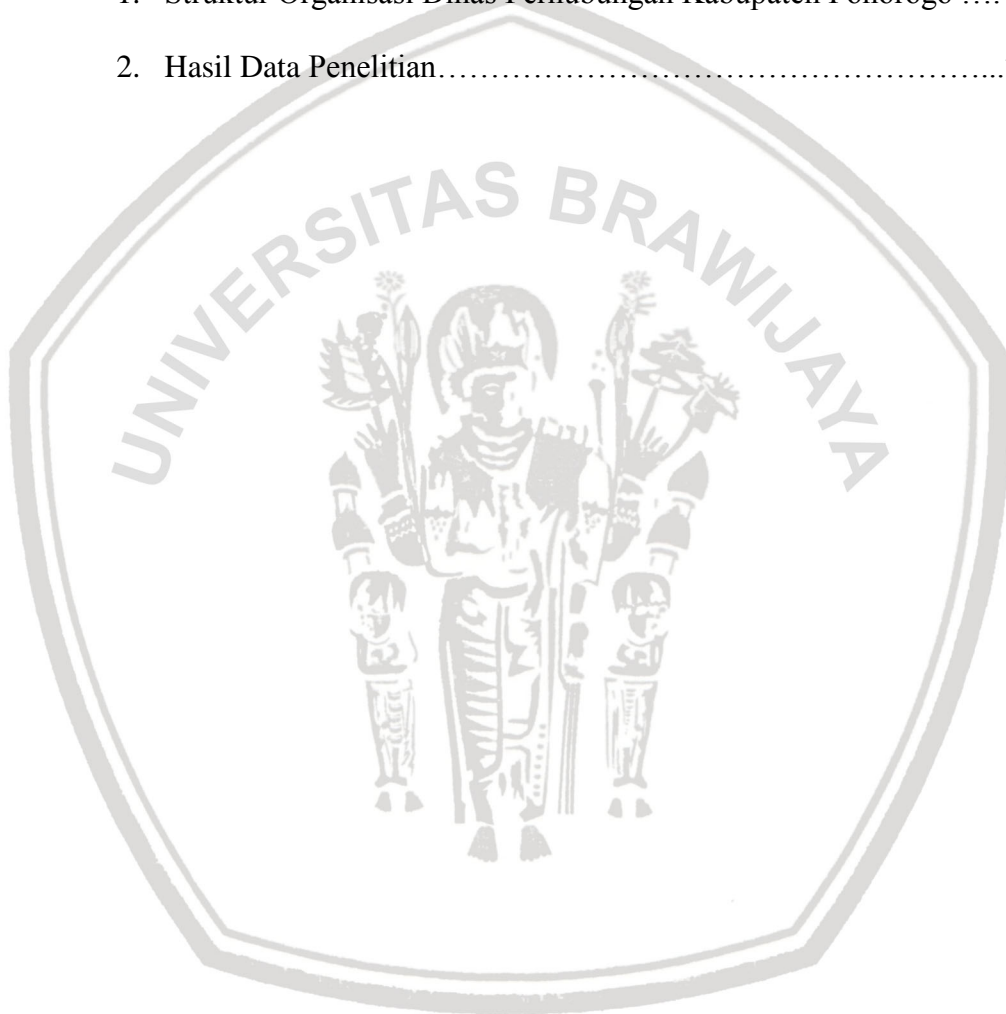
## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian

### B. DATA-DATA

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo ....71
2. Hasil Data Penelitian.....72



## RINGKASAN

**FITRI YULIANI**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2018, **UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN DPPKAD KABUPATEN PONOROGO)**, Dr. Tunggul Anshari SN, S.H.,M.Hum, Agus Yulianto S.H., M.H

---

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai fungsi sebagai pendukung pembangunan bagi daerah. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari retribusi perpajakan ini. Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu daerah yang mengelola retribusi pelayanan parkir belum maksimal dalam realisasi target yang diharapkan. Hal ini didukung berdasarkan data pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp 451.790.000,00 jika di prosentase yaitu hanya 62,32 % saja dari target yang diharapkan.

Dengan realita seperti ini maka peneliti berharap penelitian ini dapat mendeskripsikan dan menganalisis tentang upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Ponorogo. Selain itu dapat mendeskripsikan hambatan- hambatan yang terjadi dalam pengelolaannya serta manfaat dari penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah empiris (penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif).

Hasil dalam penelitian ini ialah 1. Upaya yang dilakukan pemerintah Pada pengelolaan retribusi parkir : a. Pada penerapan fungsi perencanaan, pengelolaan



yang dilakukan UPT parkir telah terjadi ketidaksesuaian b. Pada fungsi pengorganisasian terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi ketidaksesuaian antara jumlah yang tertera di struktur kebutuhan c. Pada fungsi penerapan pengarahan telah terjadi dengan baik d. pengawasan tidak berjalan secara maksimal menyeluruh. 2. Hambatannya adalah : a. Ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan prosedur b. terlalu banyak juru parkir sehingga tidak kondusif c. pengawasan tidak focus pada keseluruhan proses. d. rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. e. keterlambatan setoran f. belum lengkapnya data base 3. Manfaat retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo adalah penerimaan retribusi parkir memberikan kontribusi dan mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar, yang tentunya bermanfaat untuk berlangsungnya kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan dan lain- lain.

Menurut penulis perlu dilakukan berbagai hal sebagai berikut :

a. pengelolaan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku b. penyesuaian jumlah petugas yang dibutuhkan c. pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan pengawasan langsung ke lapangan terhadap perparkiran d. pemerintah tegas dan melakukan pembaharuan dan mengkaji ulang peraturan daerah tentang besarnya tariff pelayanan parkir e. pemerintah memberi sanksi terhadap juru parkir yang menyeleweng dari aturan.

**Kata kunci : Hukum, PAD, Retribusi Parkir, Hukum Administrasi Negara**

## SUMMARY

**FITRI YULIANI**, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, November 2018, **MEASURES TAKEN BY THE LOCAL GOVERNMENT OF THE REGENCY OF PONOROGO TO INCREASE DISTRICT OWN SOURCE REVENUE FROM LEVY IMPOSED ON PARKING SERVICE (A Study In Parking Service Agency In The Regency Of Ponorogo)** Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum, Agus Yulianto S.H., M.H

---

Regional Original Income (PAD) is one source of income that has the function of supporting development for the region. One source of revenue for the Regional Original Income comes from this parking fee. Ponorogo Regency as one of the regions that manages parking service fees has not been maximized in the realization of the expected target. This is supported based on data in 2017 with the realization of Rp. 451,790,000.00 if the percentage is only 62.32% of the expected target.

Reality, the researchers hope that this research can describe and analyze the government's efforts to increase Regional Original Revenue in the management of parking fees in Ponorogo district. In addition, it can describe the obstacles that occur in its management as well as the benefits of receiving parking retribution on Regional Original Income in Ponorogo district. This type of research is empirical (descriptive research with a qualitative approach). The results in this study are 1. Efforts made by the government In the management of parking fees: a. In the implementation of the planning function,

the management carried out by UPT parking has been incompatible b. In the organizing function, abuse of authority occurs and there is a mismatch between the amount stated in the structure of the needs c. In the function of applying the direction has happened well d. supervision does not run optimally. 2. The obstacles are: a. Incompatibility with the implementation of procedures b. too many parking attendants so it's not conducive c. supervision does not focus on the whole process. d. low public awareness in fulfilling their obligations. e. late deposit not yet complete data base 3. Benefits of parking retribution on Regional Original Revenue in Ponorogo Regency is the acceptance of parking fees contributing and encouraging the receipt of very large Regional Revenue, which is certainly beneficial for the ongoing welfare of the community, for development and others.

According to the author, it is necessary to do various things as follows: a. management must be adjusted to applicable regulations b. adjusting the number of officers needed c. the government is more active in conducting socialization or counseling and direct supervision to the field on parking d. the government is firm and updates and reviews regional regulations regarding the amount of parking service tariffs e. the government sanctioned parking attendants who deviated from the rules.

Keywords: Law, PAD, Parking Retribution, State Administrative Law

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berlakunya Peraturan Undang-undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan lebih luas dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Setiap daerah di Indonesia dituntut mandiri, memberikan pelayanan pada masyarakat secara tepat, lebih baik dalam segala bidang dan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diberbagai sektor. Dengan diberikan otonomi kepada setiap daerah tentu setiap daerah dapat menentukan sendiri kebijakan- kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau potensi dari setiap daerah tersebut. Kebijakan- kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pengelolaan setiap daerah. Namun pada dasarnya pemerintah pusat tetap mengkoordinir meskipun setiap daerah mempunyai kewenangan atau kekuatan hukum dalam membuat suatu kebijakan tertentu.

Menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan landasan yuridis dalam mengembangkan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan diberikannya otonomi kepada setiap daerah di Indonesia adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan daerah<sup>1</sup>.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan biaya yang besar. Salah satu contoh, dalam

---

<sup>1</sup> J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007) Hal. 79

memenuhi sarana prasarana dan pembangunan di daerah. Kebutuhan tersebut berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Perkembangan daerah atau kota harus diimbangi tersedianya pembiayaan yang cukup. Apabila ketersediaan pembiayaan tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan timbul berbagai masalah.

Setiap daerah memiliki keanekaragaman dan potensi yang berbeda. Pada hakekatnya setiap daerah diharapkan mampu menjadi dewasa dalam mengembangkan kemandirian di masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki tujuannya demi kesejahteraan secara menyeluruh, merata dan terpadu. Dalam menyelenggarakan aturan pada setiap daerah harus mengutamakan pemerataan keadilan, asas demokrasi dan memperhatikan potensi dari masing-masing daerah. Peran serta masyarakat dalam merealisasikan undang-undang dan peraturan daerah memiliki andil yang cukup besar. Pembangunan daerah membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah yang berwenang dan masyarakat umum guna keberhasilan maksimal sesuai yang diharapkan.

Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang - undang No. 28 tahun 2009, setiap pemerintah daerah pada tingkat Propinsi dan Kabupaten atau Kota harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan mengelola sumber penerimaan dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Dalam mewujudkan pembangunan suatu daerah yang berkesinambungan, suatu daerah tersebut diharuskan semaksimal mungkin dalam mengatur, mengali dan upaya mendapatkan sumber-sumber keuangan dari hasil punggutan seperti



pajak maupun retribusi daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari pungutan atau retribusi daerah yakni :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil-hasil dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisah
4. Lain – lainn suatu pendapatan daerah yang sah.<sup>2</sup>

Pengembangan maupun perluasan di berbagai sumber pendanaan untuk pengembangan daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah di Indonesia yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Satu diantara sumber-sumber untuk meningkatkan pendapatan dari pajak adalah pengelolaan parkir yang diatur oleh undang-undang. Retribusi parkir harus dikelola dengan baik dan profesional, hal ini dikarenakan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sangat signifikan. Dalam rangka meningkatkan hasil penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dibutuhkan aturan-aturan hukum yang jelas, konkrit agar sejalan dengan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah serta supaya dapat diterapkan sebagai sumber penerimaan daerah. Salah satunya dari sector transportasi khususnya retribusi parkir cukup berpotensi dan berkontribusi besar untuk menunjang pendapatan keuangan daerah.

Dimaksud dengan retribusi adalah antara prestasi yang dilakukan (pembayaran) dengan kontraprestasi dalam retribusi bersifat langsung, pembayaran ada imbalannya secara langsung dari pemerintah. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku untuk umum, pembayarannya mendapat

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 39



imbalan langsung, hasil retribusi untuk pelayanan umum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum maka bertanggungjawab dan berkewajiban membina pengelolaan parkir didaerahnya. Dalam penggunaan kemanfaatan parkir yang bertujuan mendapatkan penerimaan yang mendorong daya dan hasil guna (parkir umum dan parkir khusus) diperlukan aturan maupun kaidah-kaidah bagi pemerintah untuk pengelolaan dan melakukan semua kegiatan parkir mulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang membatasi ruang gerak pemerintah dan pengelola maka diharapkan dapat menjadi suatu sumber penerimaan uang daerah yang berpotensi supaya pembangunan daerah berjalan dengan lancar.

Mengelola dan mengali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara profesional, jelas, nyata merupakan keberhasilan penyelenggaraan perpajakan dalam melaksanakan kewenangannya. Setiap daerah akan terlihat kemampuan-kemampuan daerahnya sendiri dari pemanfaatan kewenangan untuk mengali sumber Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan yang wajib dilakukan secara terkoordinasi di setiap daerah adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perpajakan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan guna mewujudkan tertib administrasi pendapatan daerah, penataan kabupaten atau kota, lalu lintas lancar dan lain – lain.

---

<sup>3</sup> Dr. Tunggal Anshari Setia Negara,SH.,M.Hum,2017.Ilmu Hukum Pajak. Malang. Setara Press.Hal 10-11

Hasil dari pajak dan retribusi parkir disetiap daerah harus maksimal dalam pemanfaatannya, supaya dapat memperbaiki sarana dan prasarana setiap daerah khususnya perbaikan fasilitas parkir.

Dalam mengumpulkan hasil pendapatan daerah maka membutuhkan metode-metode. Metode-metode inilah yang akan berpengaruh terhadap penerimaan Pemerintah Daerah dari sektor retribusi parkir dan pajak. Misalnya menggunakan *parking meter*, setiap parkir umum biasanya memakai alat atau system parkir khusus yang penggunaannya menggunakan system tol. Pengelolaan kawasan yang baik akan mudah dalam pengendalian jumlah penerimaan yang masuk pada pemerintah daerah. Namun apabila parkir yang berada pada pinggir jalan, juru parkir berfungsi sebagai kasir maka akan sulit dalam pengawasannya.<sup>4</sup>

Bertambahnya jumlah penduduk tentu bertambah pula kepemilikan kendaraan. Kegiatan masyarakat dalam hal perdagangan atau komersial terutama pada kawasan yang memiliki presentase tinggi akan semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi keadaan perparkiran. Pergerakan kendaraan yang terjadi sudah jelas dimulai di lokasi parkir dan lokasi parkir menjadi akhir dari pergerakan kendaraan. Situasi dan kondisi seperti ini sudah jelas akan membutuhkan lokasi parkir yang luas serta memadai. Tidak cukup hanya membutuhkan lokasi area parkir saja namun pengelola parkir wajib memahami dan mengetahui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tentang retribusi parkir tersebut serta dapat menerapkannya dengan tegas dan penuh tanggung jawab. Namun pada kenyataannya masih banyak pengelola parkir kurang atau bahkan tidak memahami peraturan yang sudah ditetapkan sehingga kegiatan

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan, 1998. Retribusi/Sewa dan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

perparkiran tidak maksimal, tidak sejalan dengan tujuan yang direncanakan dan diharapkan. Otomatis keadaan tersebut akan berdampak pada ketidak sesuaian penerimaan yang pengaruhnya ke peningkatan PAD dirasa cukup besar.

Di wilayah Jawa Timur salah satunya Kabupaten Ponorogo sekarang ini terdapat banyak tempat parkir yang berada ditepi jalan, kondisi tersebut disebabkan hasil dari pengelolaan parkir yang dirasa cukup besar dan memberi keuntungan kepada penerimaan pemerintah daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan juru parkirnya.

Tempat parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011 merupakan lokasi nperparkiran yang ada disuatu tepi jalan umum khusus ditetapkan oleh bupati sebagai parkir suatu kendaraan. Sedangkan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan tempat layanan parkir di tepi jalan yang umum yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten baik yang bersifat rutin maupun insidentil. Parkir yang bersifat rutin atau tetap, tempat parkir yang berada dijalan umum tertentu secara tetap atau rutin. Parkir bersifat insidentil maksudnya adalah tempat parkir yang berada disuatu tepi jalan umum yang khusus secara tidak tetap atau insidentil karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.<sup>5</sup>

Perkembangan di Kabupaten Ponorogo dikhawatirkan mengakibatkan munculnya masalah-masalah seperti pengelolaan retribusi parkir yang tidak tertib, tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan berlaku di Kabupaten Ponorogo. Banyak ditemukan juru parkir yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Ponorogo, bahkan disamping alun – alun kabupaten

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Butir. 82-85

Ponorogo sering terjadi parkir liar dan pungutan parkir yang jauh diatas ketentuan yang berlaku.

Kondisi seperti ini akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mengetahui atau bahkan membiarkan dan tidak menegur juru parkir yang melakukan kecurangan. Bukan hanya hal semacam itu yang menjadi pemandangan perparkiran di kabupaten Ponorogo namun banyak juga ditemukan juru parkir yang tidak memberi karcis kepada pengguna parkir dan menarik biaya parkir diatas nominal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Untuk parkir sepeda motor 5000 rupiah per motor sedangkan biaya parkir mobil ditarik 10.000 rupiah per mobil.

Dengan kondisi perparkiran yang ada dikabupaten Ponorogo saat ini maka diperlukan adanya upaya – upaya dari pemerintah kabupaten Ponorogo agar dapat memaksimalkan potensi pajak parkir sehingga nantinya dapat berkontribusi besar dalam perkembangan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Ponorogo.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, salah satu isi dalam peraturannya adalah tariff retribusi layanan perparkiran tepi jalan umum untuk motor Rp 500,- mobil Rp 1.000,- dan untuk kendaraan seperti truk/bus Rp 2000,-

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yang dilakukan penulis ini adalah :

1. Apa manfaatnya retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan retribusi dari parkir yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo?
3. Apa hambatan – hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli dari daerah Kabupaten Ponorogo dari sector retribusi parkir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa manfaat dari penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan daerah kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam mengatur pengelolaan parkir supaya retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sector retribusi parkir.



#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini memberikan informasi bagaimana pemerintah kabupaten Ponorogo mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli dari daerah dari sector retribusi parkir dan pengaruh retribusi parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Sebagai landasan teori, sebagai landasan bergerak si lapangan dalam menangani kasus yang serupa, sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, sebagai sumbanga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu hukum.

2. Secara praktis :

a. Bagi penulis :

1. Dapat mengetahui secara nyata kondisi dunia kerja
2. Dapat merealisasikan dan menerapkan ilmunya yang diperoleh dari Perguruan Tinggi
3. Menganalisa masalah yang sebenarnya terjadi dengan teori
4. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 di Fakultas. Hukum Universitas Brawijaya Malang

b. Bagi pemerintah daerah kabupaten Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharap akan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan tentang retribusi parkir



atau perparkiran di kabupaten Ponorogo. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

c. Bagi masyarakat

1. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memerangi parkir liar di kabupaten Ponorogo
2. Dapat menjadi masukan untuk masyarakat menegur jika mengetahui adanya juru parkir yang tidak mematuhi aturan.

d. Bagi Universitas

1. Sebagai bahan evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya
2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang diperoleh di Perguruan Tinggi
3. Sebagai gambaran kesiapan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Definisi Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaksud kata upaya sama dengan usaha, ikhtiar bertujuan untuk mencapai maksud tertentu, untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Dapat disimpulkan bahwa, satu kata upaya memiliki arti yang sama dengan kata usaha dan demikian pula dengan kata ikhtiar dan upaya, yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan dan juga untuk mencari jalan keluar.<sup>6</sup>

#### B. Definisi Pemerintah

Pemerintah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk membuat maupun menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan undang-undang disetiap wilayah. Selain itu, sebagai sistem dalam menjalankan suatu wewenang, tugas dan kekuasaan untuk meningkatkan ekonomi, mengatur kehidupan sosial bermasyarakat, menciptakan politik demokratis suatu negara maupun bagian- bagiannya.

Pemerintah merupakan senjata dalam penyelenggaraan segala bentuk kepentingan masyarakat atau rakyatnya untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah ialah agen pelayanan publik yang memiliki kewenangan-kewenangan, kekuasaan, tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan arus pemerintahan. Hakekat dari pelayanan publik

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

sendiri mempunyai maksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai asas-asas pelayanan publik (umum) meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

### C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan dari sumber-sumber di daerah itu sendiri, pemunggutannya didasarkan pada peraturan daerah yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup>

Pendapatan asli dari daerah yang didapatkan dari hasil pungutan pajak daerah, hasil dari retribusi suatu daerah dan hasil pengelolaan kekayaan suatu daerah serta lain-lain dari hasil pendapatan daerah yang sah. Hal ini tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada daerah yang berwenang untuk menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Sektor pendapatan daerah sangat berperan penting sebagai tolak ukur besarnya pendapatan dari daerah. Daerah dapat melakukan pembiayaan dalam kegiatan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah disebut sebagai penerimaan yang sangat penting perannya bagi setiap pemerintahan daerah untuk mendukung proyek pembangunan daerah maupun semua kegiatan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000,

---

<sup>7</sup> Kusnandi, Moch. dan Saragih, R. Bintan, 2008. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hal 122

<sup>8</sup> Siahaan, Mariot. P. 2005. Pajak Daerah Retribusi dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal 14

menjelaskan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dimaksudkan dengan pendapatan daerah itu merupakan penerimaan kas daerah pada anggaran periode atau tahun tertentu yang menjadi hak daerah.<sup>9</sup>

- Sumber-sumber pendapatan daerah bersumber dari:

#### Pendapatan Asli Daerah

##### 1) Pajak Daerah

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan terutang oleh seseorang wajib pajak dengan tanpa mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung yang hasilnya itu dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran dalam negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya.<sup>10</sup>

Dari definisi tentang pajak diatas tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau pungutan warga negara kepada pemerintah untuk penerimaan khas negara yang digunakan untuk pembayaran kepentingan pengeluaran umum yang mempunyai sifat wajib dan memaksa yang artinya dengan tidak mendapatkan timbal balik jasa berdasarkan undang-undang yang berlaku.

<sup>9</sup> Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. 2002. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>10</sup> Siahaan, Mariot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Grafindo Persada Hal.

Suatu misal pajak, umumnya pajak suatu daerah mempunyai peran ganda yaitu:

- a) Sebagai sumber-sumber pendapatan dari wilayah pemerintah daerah *Budgetary*
- b) Sebagai alat untuk pengatur atau (*Regulatory*)

Suatu jenis pajak dalam keadaan tertentu dapat bertindak sebagai sumber pendapatan daerah, namun dapat menjadi sesuatu jenis-jenis pajak tertentu dan sebagai alat untuk mengatur alokasi retribusi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah maupun wilayah tertentu. Beberapa jenis-jenis pajak menjadi sumber dari pendapatan pemerintah ditingkat provinsi diantaranya:

- a) Pajak di kendaraan bermotor
- b) Bea dari hasil balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan kendaraan bermotor

Selanjutnya berbagai macam pajak yang pungutannya dilakukan oleh daerah Kota maupun Kabupaten yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah Kota maupun Kabupaten diantaranya:

- a) Pajak- pajak hotel dan restoran
- b) Pajak hiburan
- c) Pajak reklame
- d) Pajak penerangan dijalan
- e) Pajak-pajak pengolahan maupun pengambilan bahan galian
- f) Pajak yang memanfaatkan air permukaan dan air bawah tanah

g) Pajak lain yang memenuhi syarat-syarat pajak baru.

Sedangkan ciri- ciri dari pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan yaitu seperti berikut:<sup>11</sup>

- a) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat pemerintah daerah
  - b) Pembayaran pajak harus masuk pada kas negara
  - c) adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan.
  - d) Secara umum penyelenggaraan pemerintah dianggap manifestasi kontra prestasi dari suatu negara yang ditujukan kepada para pembayar atau kepada wajib pajak
  - e) Perbuatan berdasarkan peraturan undang- undang tentang pajak dikenakan pajak
- 2) Hasil Retribusi Daerah

Pungutan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemakaian maupun perolehan jasa dalam pekerjaan, usaha atau milik daerah demi kepentingan umum masyarakat, maupun karena jasa dari suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung terhadap rakyat atau masyarakatnya merupakan retribusi daerah<sup>12</sup>

3) Hasil dari Pengelolaan Kekayaan di Daerah yang Dipisahkan

<sup>11</sup> Siahaan, Maeriot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal. 8

<sup>12</sup> Kaho, Josep Riwu. 2005. Prospek Otonom Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 171



Kekayaan daerah yang dipisahkan artinya adalah kekayaan daerah yang penguasaan umum dilimpahkan melalui anggaran daerah yang dipertanggungjawabkan sendiri oleh setiap daerah. Contohnya adalah penjualan saham milik daerah, dividen dan bagian laba.

4) Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya, adalah lain- lain asli pendapatan suatu daerah yang diterima pemerintah. Lain- lain asli pendapatan daerah adalah dimaksudkan pendapatan di daerah yang diperoleh dari lain- lain milik pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim, lain-lainnya dari pendapatan asli suatu daerah adalah penerimaan daerah diperoleh dari jasa atau barang milik pemerintah itu sendiri.<sup>13</sup>

Penerimaan-penerimaan pemerintah ini berasal dari:

- a. Hasil barang-barang milik daerah yang dijual. Contohnya penjualan drum-drum bekas aspal
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisihnya nilai tukar dari rupiah pada mata uang luar negeri
- e. Komisi, potongan, atau bentuk lain akibat dari hasil penjualan maupun pengadaan barang-barang atau jasa-jasa di daerah
- f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

<sup>13</sup> Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat

- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan dari denda pajak
- i. Pendapatan dari denda retribusi
- j. Pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan-jaminan
- k. Pendapatan pengembalian
- l. Fasilitas sosial maupun umum
- m. Pendapat dari penyelenggaraan pendidikan dan
- n. Pelatihan pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

#### 1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yaitu dari:

##### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana dibagi hasil merupakan pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang hasilnya akan dibagi kepada daerah-daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

##### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU tujuannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan setiap antar daerah-daerah yang mempunyai maksud mengurangi timpang tindih dalam hal kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan penerapan suatu formula yang sangat teliti dalam melihat dan menimbang antara kebutuhan dan potensi di daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu pembiayaan kegiatan- kegiatan khusus suatu daerah dan harus sesuai dengan prioritas standart nasional yang ditetapkan, khususnya untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar kepada masyarakat yang belum mencapai standart tertentu atau untuk mendorong kemampuan dalam percepatan pembangunan daerah.

2. Lain- lain Pendapatan

Menurut Lukman H, didalam “Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah” didalam suatu badan pendidikan dan pelatihan-pelatihan daerah, pendapatan daerah fungsi anggarannya diarahkan terhadap fungsi keuangan yang dimiliki negara yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Fungsi Alokasi

Proses sumber daya nasional (*resources*) digunakan untuk barang private dan barang publik yang keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat

b. Fungsi Retribusi

Anggaran keuangan negara untuk pembagian pendapatan baik dari kepemilikan sumber daya maupun faktor- faktor produksi. Keuangan berperan sebagai anggaran untuk pembagian pendapatan.

c. Fungsi Stabilitas

<sup>14</sup> Lukman. H dalam “ Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Anggaran negara adalah suatu alat kebijaksanaan makro pemerintah. Bila pemerintah menaikkan pajak, maka konsumsi rumah tangga akan berkurang komponen agregat. Sebaliknya apabila pemerintah, menurunkan pajak, maka konsumsi rumah tangga akan tinggi dan pengeluaran agregat menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan output (pendapatan nasional).

### 3. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang wajib dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik secara langsung pada tahun suatu anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan tersebut bersumber dari:

- a. Sisa lebih yang didapat dari perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

### D. Retribusi Daerah

Pengertian dari retribusi berdasarkan isi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi merupakan pungutan daerah bertujuan untuk pembayaran jasa atau pemberian izin khusus, pemerintah daerah menyediakan dan atau memberikan untuk kepentingan;pribadi atau badan.<sup>15</sup> Menurut para ahli, salah satunya menurut Marihot P. Sihaan, retribusi ialah pembayaran atau iuran oleh masyarakat atau penduduk

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepada negara dikarenakan negara memberikan jasa tertentu bagi penduduknya secara perorangan serta sifatnya wajib<sup>16</sup>.

Pungutan daerah dimaksudkan untuk pembayaran jasa atau pemberian izin khusus pada pribadi atau perorangan untuk kepentingan pribadi maupun suatu badan oleh pemerintah, hal ini merupakan pengertian dari retribusi daerah, selanjutnya disebut dengan retribusi<sup>17</sup>

Retribusi daerah merupakan pungutan untuk pembayaran atas pemakaian jasa pekerjaan, usaha milik daerah demi kepentingan umum maupun karena daerah memberikan jasa secara langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup>

Secara umum pengertian dari retribusi itu sendiri adalah pembayaran pada negara yang dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan jasa- jasa negara. Sedangkan menurut Tony Marsyanul, retribusi adalah iurannya rakyat kepada kas negara didasarkan pada undang- undang yang sifatnya memaksa dengan mendapatkan timbal balik jasa (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

a. Ciri-ciri Retribusi

Dari pendapat beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan, ciri- ciri pokok retribusi yaitu:

<sup>16</sup> Siahaan, Maeriot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal. 6

<sup>17</sup> Siahaan, Maeriot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal. 432

<sup>18</sup> Kaho, Josep Riwu. 2005. Prospek Otonom Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 171

<sup>19</sup> Tony Marsyahrul. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Gramedia). Hal. 2



1. Retribusi dipungut oleh masing- masing daerah dan penerimaan retribusi masuk kas suatu daerah
2. Retribusi diwajibkan bayar kepada siapa saja yang menggunakan, menikmati dan memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah
3. Sanksi jika tidak mematuhi aturan tentang retribusi adalah sanksi administrasi

b. Obyek Retribusi

Obyek retribusi merupakan jenis-jenis pelayanan jasa-jasa tertentu saja yang pemerintah daerah sediakan. Jasa layanan ini dapat dipungut retribusinya hanya jenis jasa layanan yang dipertimbangkan sosial ekonominya layak atau tidaknya dijadikan obyek retribusi. Jasa pelayanan tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikenakan jasa umum yaitu disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan-pelayanan umum yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan diharapkan dapat dinikmati oleh setiap orang pribadi maupun badan.
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha yaitu pemerintah menyiapkan atau menyediakan pelayanan dengan menggunakan prinsip-prinsip komersial.
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu yaitu berupa pemerintah daerah mempunyai kegiatan tertentu untuk memberi izin kepada perorangan atau badan dengan tujuan untuk suatu pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap



kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang-barang, prasarana, sarana, atau fasilitas yang tentu akan mempunyai daya guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan bersama.

c. Subyek retribusi daerah meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum, merupakan perorangan atau pribadi atau suatu badan yang menggunakan maupun menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan dan menikmati layanan jasa usaha-usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu, merupakan perorangan atau suatu badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan yang ada di pemerintah dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum yang sifatnya bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha maupun retribusi suatu perizinan tertentu.
- b. Jasa-jasa yang bersangkutan adalah suatu kewenangan dari daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi perorangan pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi, dan juga sebagai pelayan kepentingan dan kemanfaatan umum
- d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta sebagai salah satu sumber dalam pendapatan yang potensial
- g. Pemungutan retribusi dinilai penyediaan jasanya tersebut dengan tingkatan dan atau kualitas pelayanannya yang lebih baik.

Retribusi jasa umum merupakan pemberian jasa oleh pemerintah pada perorangan pribadi atau badan yang tujuannya demi kepentingan, kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Di dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Pasal 127 dinyatakan bahwa beberapa macam jenis retribusi jasa umum yaitu:<sup>20</sup>

- a. Retribusi Layanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi untuk menggantikan biaya cetak Kartu Tanda

---

<sup>20</sup> Tunggal Anshari. 2017. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press. Hal 36-37

Penduduk (KTP) serta Akte Catatan Sipil,

- d. Retriibusi pelayanann makam dan pengabuan mayat
  - e. Retribusi layanan perparkiran di tepi jalan umum,
  - f. Retribusi layanan pasar,
  - g. Retribusi pengujiann kendaraan bermotor,
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
  - i. Retribusi biaya penggantian cetak peta,
  - j. Retribusi Penyediaan atau penyedotan kakus
  - k. Retribusi pengolahan limbah cair
  - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - m. Retribusi pelayanan pendidikan
  - n. Retribusi pengendali menara telekom
2. Retribusi jasa usaha

Kriteria-kriteria Retribusi Jasa Usaha berdasarkan kaidah atau aturan dari yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah :

- a. Retribusi jasa usaha yang bukan merupakan pajak dan sifatnya bukan retribusi jasa umum maupun suatu perizinan-perizinan tertentu, dan
- b. Jasa disebut bersangkutan adalah jasa komersial yang seharusnya penyediannya adalah pihak-pihak swasta namun belum memadai atau terdapat harta yang dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan dengan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Berikut ada beberapa macam jenis dari retribusi jasa usaha menurut isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 adalah:<sup>21</sup>

- a. Retribusi penggunaan kekayaan daerah,
  - b. Retribusi pasar grosir/pertokoan,
  - c. Retribusi tempat-tempat pelelangan,
  - d. Retribusi di terminal
  - e. Retribusi tempat khusus parkir
  - f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa,
  - g. Retribusi rumah pemotongan hewan,
  - h. Retribusi layanan pelabuhan kapal
  - i. Retribusi lokasi rekreasi dan olahraga
  - j. Retribusi penyeberangan di atas air
  - k. Retribusi penjualan produk di daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan pemerintah menetapkan retribusi perizinan tertentu dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. Perizinan yang dimaksud termasuk kewenangannya pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pertimbangan asas desentralisasi,
  - b. Perizinan tersebut benar diperlukan tujuannya guna melindungi kepentingan umum, dan

<sup>21</sup> Tunggal Anshari. 2017. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press. Hal 38

- c. Biayanya yang menjadi kewajiban daerah dalam menyelenggarakan izin untuk penanggulangan dampak negatif didapat dari hasil perizinan yang cukup besar sehingga mampu dan pantas/layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut merupakan beberapa jenis retribusi dari perizinan tertentu yang meliputi :

- a. Retribusi izin untuk bangunan
- b. Retribusi tempat-tempat penjualan minuman yang mengandung al kohol
- c. Retribusi izin gangguan,dan
- d. Retribusi izin trayek.

Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sendiri menjadi kewenangannya provinsi atau kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan provinsi diantaranya adalah retribusi layanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan dari daerah, retribusi penggantian biaya cetak pada peta, retribusi pengujian kapal'perikanan.

Retribusi yang menjadi wewenang kabupaten/ kota diantaranya retribusi pelayanan untuk kesehatan, retribusi pelayanan sampah//kebersihan lingkungan, retribusi untuk ganti biaya pembuatan cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta catatan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi layanan parkir di tempat

tepi jalan umum, retribusi layanan pasar, retribusi pengujian pada kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam, retribusi ganti biaya dari cetak peta, retribusi dari pengujian kapal perikanan, retribusi pemakaian dari kekayaan daerah, retribusi jasa usaha diperoleh dari pasar grosir dan toko retribusi jasa usaha tempat-tempat pelelangan, retribusi di jasa usaha terminal, retribusi jasa dari usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha dari tempat penginapan atau villa, retribusi jasa usaha penyedotan WC atau kakus, retribusi jasa usaha dari rumah pemotongan hewan, retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, retribusi jasa hasil dari usaha pengolahan limbah cair, retribusi jasa usaha dari penjualan produksi, retribusi izin untuk mendirikan suatu bangunan, retribusi atas izin tempat-tempat yang menjual minuman yang mengandung alkohol, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek.

Retribusi berbeda dengan pajak dilihat dari sifat- sifat khususnya diataranya adalah:

- a) Retribusi daerah sifatnya kembar, artinya dari satu sumber jenis- jenis atas retribusi dapat dikenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa-jasa instansi dan keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan pajak yang hanya oleh boleh satu instansi atasnya saja.
- b) Pemungutan retribusi tersebut didasarkan pada



pemberian jasa kepada pemakai jasa. c) seseorang atau masyarakat yang telah mendapatkan jasa dari pemerintah maka pemerintah dapat menarik pungutan retribusinya kepada orang dewasa maupun anak-anak. Sementara itu pajak dibayarkan oleh orang-orang tertentu, yaitu yang wajib pajak. d) Pemungutan retribusi akan dilakukan berulang-ulang kali terhadap seseorang selama ia mendapat jasa dari pemerintah daerah meskipun jumlahnya relatif kecil maka, pembayarannya jarang diangsur.

#### **E. Retribusi Parkir**

Retribusi parkir adalah suatu bagian dari retribusi jasa umum yang telah disediakan pemerintah daerah yang bertujuan demi kepentingan umum. Obyek dari pada retribusi ini diantara adalah demi kepentingan umum, pribadi maupun badan.<sup>22</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, parkir dapat diartikan dimana suatu kendaraan bermotor berhenti untuk sesaat serta lamanya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011, parkir merupakan suatu keadaan dimana kendaraan berhenti dan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pengemudinya untuk beberapa saat.<sup>23</sup>

Parkiran secara umum dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya agar lalu lintas menjadi lancar dalam rangka meningkatkan produktifitas SDA dan SDM yang dimiliki oleh negara. Perparkiran dapat dikatakan sebagai

---

<sup>22</sup> Ahmad Yani, op.cit. Hal. 56

<sup>23</sup> Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2016 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Butir. 81

salah satu usaha dasar untuk meningkatkan SDA dan SDM demi tercapainya tujuan masa lampau yang kurang baik menjadi lebih baik lagi.<sup>24</sup>

Dalam rangka mencapai pelayanan dan pelaksanaan perparkiran yang efektif dan kondusif maka setiap daerah dapat secara kreatif mampu menciptakan dan dapat meningkatnya sumber pendapatan asli daerah. Sumber- sumber pendapatan asli dari daerah yang sangat potensial salah satunya adalah dari sektor retribusi parkir.

Tempat parkir menurut Perda Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011 adalah suatu tempat yang ada ditepi jalan umum, yang telah ditetapkan oleh bupati atas aturan-aturan hukum sebagai tempat-tempat parkir kendaraan. Sedangkan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan tempat layanan parkir ditepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten baik yang bersifat rutin maupun insidentil. Parkir yang bersifat rutin atau tetap, tempat parkir yang berada di jalan umum tertentu secara tetap atau rutin. Parkir bersifat insidentil maksudnya adalah tempat parkir ditepi jalan umum tertentu secara tidak tetap atau insidentil karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.<sup>25</sup>

Retribusi atas tarif parkir yang menggunakan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kotaberdasarkan peraturan undang-undang pajak di daerah dan retribusi

---

<sup>24</sup> Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana. Hal. 48

<sup>25</sup> Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan Jasa Umum. Butir. 82-85

daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat kabupaten/ kota dengan peraturan daerah.<sup>26</sup>

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu prangkat yang digunakan sebagai alat dalam suatu kebijakan pengelolaan lalu lintas jalan di kawasan kota demi membatasi dan mengendalikan pengguna kendaraan pribadi di kawasan tertentu yang menjadi pendapatan asli daerah penting.

Prinsip dan sasaran dari tarif retribusi parkir di setiap daerah berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah masing-masing, kemudian penetapan tarif retribusi parkirnya-pun juga berbeda-beda sesuai dengan angka kemacetan jalan umum, misalnya, jalan umum yang angka kemacetannya lebih tinggi, maka tarif retribusinya lebih tinggi dari pada jalan umum yang angka kemacetannya rendah.<sup>27</sup>

#### **F. Pajak**

Pengertian dari pajak menurut para ahli dan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007, memuat ketentuan umum dan tata caranya perpajakan. Pajak merupakan kontribusinya masyarakat atau rakyat atau disebut dengan wajib pajak kepada negaranya yang terutang oleh perorangan atau badan (yang sifatnya memaksa) sesuai dengan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan tidak digunakan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Siahaan, Marihot. P. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 49

<sup>27</sup> Ahmad Yani, op.cit. Hal. 64

<sup>28</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara sifatnya memaksa terutang oleh yang wajib membayar berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan digunakannya, wajib pajak membayar pajak untuk pembiayaan semua pengeluaran umum yang berkaitan dengan semua tugas negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah.<sup>29</sup> Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran wajib pajak untuk kas negara didasarkan pada undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana, digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Tunggal Anshari pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dengan tujuan untuk kas negara berdasarkan peraturan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung individual.<sup>31</sup>

#### 1. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri dari beberapa pengertian pajak dapat diringkas menjadi beberapa ciri yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pajak dipungut oleh negara untuk rakyat, baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya

<sup>29</sup> Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia Edisi Ke 8 Buku Ke 1. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 2

<sup>30</sup> Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Hal. 1

<sup>31</sup> Tunggal Anshari. 2017. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press. Hal 5

<sup>32</sup> Muhammad Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 12

- b. Pemungutan pajak ditandai dengan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrasi pajak)
- c. Pemungutan pajak dialokasikan untuk keperluan pembiayaan-pembiayaan umum pemerintah untuk menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintahannya, baik rutin maupun pembangunan
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontaprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak
- e. Fungsinya sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara, suatu anggaran negara yang diperuntukkan menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur atau sebagai pelaksanaan dari semua kebijakan negara di semua sektor ekonomi maupun sektor sosial (fungsi mengatur atau regulatif)

## 2. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut para ahli sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menurut golongan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
  1. Pajak langsung, yakni pajak yang diemban sendiri oleh yang wajib membayar pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Pajak wajib menjadi beban perorangan atau badan wajib pajak yang bersangkutan.

---

<sup>33</sup> Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 7



2. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang bisa dilimpahkan kepada pihak lain maupun pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi apabila mengalami suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan pajak menjadi terutang, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
- b. Menurut sifat pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan suatu keadaan dan kondisi dari pribadi yang wajib pajak atau pengenaan pajak dengan melihat dan memerhatikan keadaan subjeknya.
  2. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang berakibat terjadinya kewajiban membayar pajak tanpa melihat keadaan dari pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya.
- c. Menurut lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pajak negara atau pusat, dimana pemerintah pusat memungut pajak yang digunakan dalam pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
  2. Pajak daerah, dimana pemerintah daerah memungut pajak baik tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/ kota yang digunakan dalam membiayai rumah tangga masing-masing.



### 3. Fungsi Pemungutan Pajak

Fungsi pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu.<sup>34</sup>

- a. Fungsi *budgeter*, yaitu memasukkan penerimaan pajak ke kas negara yang digunakan untuk belanja negara. Kelebihan pada pajak mempunyai fungsi sebagai alat penarikan dana dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara, di negara Indonesia sendiri, dana yang asalnya dari penerimaan pajak sangat tinggi dan dianggap sebagai primadona karena 80% anggaran pemerintah diperoleh dari pajak. Pajak menjadi tujuan untuk keperluan negara. Negara diwakili oleh menteri keuangan untuk mengajukan usul ketika memerlukan uang kas negara. Sifat keuangan negara dengan keuangan keluarga sangat berbeda. “ *De Tering’Naar De Nering Zetten* ” artinya pengeluaran harus disesuaikan dengan penerimaan. Namun berbeda kenyataannya dengan keuangan negara. Negara membuat perencanaan jumlah uang yang diperlukan kemudian negara mencari uang yang diperlukan tersebut. Dalam pepatah Belanda “ *De Nering’Naar De Tering’Zetten* ” kebalikan dari keuangan keluarga yang artinya masalah keuangan direncanakan terlebih dahulu kemudian dicari sumbernya.

Dalam menyusun suatu anggaran apabila ada kekurangan maka menteri keuangan harus mencari solusinya dari mana kekurangan anggarannya itu harus ditutup. Berikut ada berbagai hal untuk memecahkannya :

---

<sup>34</sup>Tunggul Anshari. 2016. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press.hal 13-17

1. Membuat pajak baru
2. Intensifikasi pajak atau mengadakan pemeriksaan yang ketat
3. Memberantas korupsi

b. Fungsi *regularend*, yaitu fungsi dari pajak sebagai alat untuk penggerak masyarakat agar tercipta kesejahteraan dalam sarana perekonomian. Sarana dalam fungsi mengatur ini merupakan sebagai pendorong dan pengendali kegiatan masyarakat supaya sesuai dengan rencana dan keinginan pemerintah meskipun terkadang tidak menguntungkan. Ada titik positif dan negatifnya dari pelaksanaan fungsi tersebut. Positifnya, pemerintah memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) dengan memberi fasilitas perpajakan berupa sebagai berikut :

1. Pemberian atas pembebasan dari pajak (*tax holiday*) dan keringanan pajak dalam jangka waktu tertentu bagi investor baru
2. Pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah
3. Pengecualian pajak bagi pertunjukan kesenian tradisional
4. Kompensasi terhadap kerugian perusahaan

Sedangkan pelaksanaan fungsi mengatur yang negatif dengan membuat peraturan dibidang pajak yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang ingin diberantas pemerintah. Tindakan pemerintah ini disebut *des incentive tax* :

1. Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu
2. Pemberian hambatan terhadap barang-barang terlarang seperti miras agar masyarakat tidak mengkonsumsinya.

c. Fungsi Sosial

Mengakui hak-hak perseorangan namun tidak diperbolehkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Besarnya pungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan seseorang dalam mencapai kepuasan kebutuhan primernya.

Fungsi sosial merupakan bagian dari fungsi lainnya, jadi fungsi ini harus :

1. Memberi pembebasan pajak atas penghasilan minimum kehidupan
2. Memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan yang berpengaruh besar kecilnya kebutuhan hidupnya.

4. Syarat Fungsi Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak ada empat, yaitu:

- a. Syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil
- b. Syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak wajib didasarkan dengan undang-undang
- c. Syarat ekonomis, yaitu di dalam pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- d. Syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien

## 5. Sistem Dalam mungut Pajak

Sistem yng digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Official assenment system*, merupakan sistem yang memungut pajak dengan memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang terutang
- b. *Self assesment system*, merupakan pemungutan pajak dengan memberikan sepenuhnya kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab kepada pewajib pajak atau masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan diri berapa besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *With holding system*, adalah pemunggutan pajak dengan sistem memberikan wewenang pada suatu pihak ketiga dalam menentukan besarnya pungutan dan memotong besar pajak terutang oleh seseorang yang wajib pajak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dilakukan perbaikan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum dan tata cara dari perpajakan yang berbunyi sebagai berikut: a) Pengabdian kewajiban perpajakan merupakan pemungutan pajak dalam rangka mewujudkan keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional. b) Anggota masyarakat mengemban kewajiban atas tanggung jawab dari wajib pajak, sehingga dalam hal ini aparat pajak pemerintah sesuai dengan fungsinya berkewajiban

---

<sup>35</sup> Madiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Hal. 7

untuk melakukan penyuluhan dan penelitian serta pengawasan terhadap kewajiban pelaksana atas wajib pajak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. c) Sistem kepercayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kegotongroyongan nasional untuk menghitung dan memperhitungkan serta membayar sendiri pajak yang terhutang (*self zassessment*), sehingga dengan adanya sistem seperti ini mampu menciptakan pelaksanaan administrasi yang rapi, sederhana, dan dapat dengan mudah dipahami oleh semua anggota masyarakat wajib pajak.

#### 6. Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan. Wajib pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan pajak tersebut. Menurut “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009” perubahan ketiga dari “Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983” mengenai ketentuan Perpajakan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi delapan, yaitu:<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

<sup>37</sup> Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan) Perubahan Ke Empat Atas UU No. 7 Tahun 1983



- a. Orang pribadi yang wajib pajak menerima penghasilan dari pekerjaan. Contohnya, pegawai swasta dan PNS
- b. Orang pribadi yang menerima wajib pajak menerima penghasilan dari usaha. Contohnya, pengusaha toko emas dan pengusaha industri mie kering
- c. Orang pribadi yang menerima wajib pajak menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Diantaranya, Notaris, akuntan, dokter dan konsultan
- d. Perorangan yang wajib pajak menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contohnya berhubungan dengan pemodalan, seperti bunga pinjaman dan royalti
- e. Perorangan yang wajib pajak menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contohnya seperti bunga deposito dan hadiah undian
- f. Perorangan wajib pajak menerima penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya seperti bantuan dan sumbangan
- g. Perorangan yang wajib pajak menerima penghasilan dari luar negeri. Contohnya seperti bunga dan royalti PPh Pasal 24
- h. Perorangan yang wajib pajak menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contohnya seperti pegawai swasta yang juga mempunyai usaha rumah makan dan PNS tetapi membuka praktek dokter.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau langkah - langkah melakukan sesuatu dengan menggunakan dan memanfaatkan pikiran secara seksama demi mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun suatu laporan.<sup>38</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>39</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>40</sup> Penelitian adalah hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan mendapatkan informasi nyata tentang suatu hal yang sangat penting yang dilakukan dalam sebuah penelitian.

Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sector retribusi parkir.

---

<sup>38</sup> Cholid Narbuko Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003). Hal 1

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2012) hal 5.

<sup>40</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, t.t) hal 55

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang diambil dan digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan dan membandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa prosedur penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang telah digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya adalah jenis penelitian ilmu hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>42</sup> Dengan kata lain yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.<sup>43</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode yang peneliti digunakan didalam pelaksanaan penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan peraturan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 126

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 15

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 16

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986) hal 51

pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui upaya pemerintah kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan PAD dari sector retribusi parkir.

Pendekatan perundang-undangan atau (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah dari semua regulasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pautan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap undang-undang, PP dan Perda terkait dengan PAD dan retribusi parkir.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo yang berlokasi ditengah- tengah kota Ponorogo, yaitu di jalan Alun-Alun Utara No.9 Nologaten Ponorogo.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini bersumber dari data primerr dan data sekunder.

- 1) Data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber-sumber pertama yang kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.<sup>45</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- 2) Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh atau didapatkan dari berbagai buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini didapatkan dari semua data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti

---

<sup>45</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006) hal 30

buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>46</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>47</sup>

### E. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer ataupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

#### 1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi dan kondisi peran antara pribadi yang bertatap muka dengan seseorang pewawancara (yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan) kepada narasumbernya yang dirancang untuk memperoleh jawaban dari narasumber atau responden yang nyata, relevan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian kepada responden.<sup>48</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara jelas, sistematis dan tentunya terarah disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut

<sup>46</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983) hal 56

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986) hal 12

<sup>48</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006) hal 82

semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>49</sup>

## 2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>50</sup>

Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

### 1) *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini dianggap sangat penting karena terkadang data yang diperoleh belum memenuhi harapan dari peneliti, terkadang ada diantaranya yang kurang bahkan dimungkinkan terlewatkan.<sup>51</sup>

### 2) *Calssifying*

Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan didalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh memuat semua informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

<sup>49</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum hal 167-168

<sup>50</sup> Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal 71

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta : Rieneka Cipta, 2002) hal 182



### 3) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengoreksi ulang data-data yang telah terkumpul bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kevalidan data-data dengan benar dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>52</sup>

### 4) Analisis Data

Analisis data adalah proses meneguraikan atau mengelompokkan dan mengurutkan data dalam pola, dalam kategori maupun satuan uraian yang mendasar sehingga dapat ditemukan tema-tema dan dapat disimpulkan atau dirumuskan hipotesis kerjanya. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah semua data yang didapat dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisa semua data tersebut dengan menggunakan analisa deskriptif-kualitatif.

Analisis data kualitatif ialah segala upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilahnya menjadi suatu satuan yang tentunya dapat dikelola, dicari, ditemukan pola-pola yang dianggap penting dan apa yang dipelajari serta menemukan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J.Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) hal 104

<sup>53</sup> Lexy J.Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Ed.Rev Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010) hal 248



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo luasnya 1.371,78 km<sup>2</sup> dengan ketinggiannya antara 92 - 2.563 meter diatas permukaan laut, yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun , Magetan dan Nganjuk disebelah utara. Sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Di Kabupaten Ponorogo ini dilewati banyak sungai, ada sejumlah 14 sungai yang panjangnya antara 4 km-58 Km yang dimanfaatkan sebagai sumber irigasi oleh masyarakat untuk lahan pertanian yang memproduksi padi ataupun hortikultura. Sebagian besar dari luas lahan yang tersedia terdiri dari area kehutanan dan area sawah sedangkan sisa lahannya dimanfaatkan untuk pekarangan. Iklim yang ada di Kabupaten Ponorogo ada dua iklim, iklim kemarau dan iklim penghujan.

Jumlah penduduk kabupaten Ponorogo berdasarkan sensus penduduk sekitar 1.130.648 jiwa. Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, yang terletak sebelah barat dari provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan Jawa Tengah, 220 km arah baratdaya dari ibukota propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Pusat pemerintahannya di Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan dan dibagi menjadi 279 desa, 26 kelurahan. Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang berkembang. Dari tahun 2013 Ponorogo mengalami perkembangan ekonomi yang konsisten. Saat ini di Ponorogo sudah banyak dijumpai pusat perbelanjaan modern maupun tradisional.

Di pusat kota banyak didirikan mall. Dengan kondisi perkembangan tersebut sehingga mempengaruhi tingkat karamaian di pusat kota. Jalan mulai padat dengan kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan yang lainnya. Situasi seperti ini tentunya berpengaruh terhadap perparkiran. Tempat-tempat parkir di daerah kota Ponorogo setiap harinya penuh dengan kendaraan. Tak sedikit tempat parkir sampai memakan jalan yang akhirnya membuat jalan sedikit macet. Namun walaupun demikian ada sisi positif dari keadaan semacam ini. Pendapatan Asli Daerah dari sector parkir akan meningkat

Perkembangan perekonomian Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013 sampai dengan 2018 menunjukkan perkembangan yang dinamis , sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Ditinjau dari keadaan saat ini sector pertanian ada penurunan. Dengan adanya pasar-pasar modern maka perekonomian di Kabupaten Ponorogo sampai saat ini yang berkembang adalah dari sector perdagangan.

Di era modern seperti saat ini setiap orang melilki kendaraan pribadi. Baik sepeda motor maupun mobil. Seperti di Kabupaten Ponorogo perkembangan jumlah kendaraan bermotor cukup signifikan. Pada tahun 2016 berjumlah 376.471 unit. kendaraan keseluruhan Mobil dan lain-lainya dijumlah menjadi 415.697 unit. Kondisi seperti ini tentunya sangat berpengaruh terhadap retribusi parkir.

## B. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

### a. Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan:

- Dapat menciptakan suatu sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya.

Misi Dinas Perhubungan:

- Mewujudkan transportasi yang aman, selamat, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.
- Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi.<sup>54</sup>

### b. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan ditetapkan tujuan yaitu :

1. Untuk meningkatkan suatu mutu pelayanan transportasi daerah bertujuan untuk menjamin berjalannya lalu lintas masyarakat dan barang dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Untuk mewujudkan dari tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berupaya untuk menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> <https://perhubungan.ponorogo.go.id/profil/visi-dan-misi/>

- Tersedia dan terpelihara prasarana LLAJ sehingga diharapkan menekankan tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berada di jalan;
- Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal;
- Ketersediaan angkutan penumpang umum;
- Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor
- Tersedianya sarana-sarana transportasi yang baik jalan dan ramah lingkungan.<sup>55</sup>

2. Meningkatkan ketersediaannya sarana-sarana komunikasi dan informasi yang berguna untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menetapkan beberapa sasaran yaitu :

- Kelancaran dalam penyampaian informasi maupun masukan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya
- Peran serta dalam pameran pembangunan.

#### c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas-asas yaitu asas- asas otonomi dan asas tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut maka Dinas Perhubungan berfungsi:

<sup>55</sup> <https://perhubungan.ponorogo.go.id/profil/tujuan-dan-sasaran/>

1. merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat di berbagai bidang misalnya bidang perhubungan, bidang komunikasi dan bidang informatika
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi urusan rumah tangga dinas
5. Pelaksanaan mengkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang telah diberikan oleh Bupati.<sup>56</sup>

#### G. Seksi Perparkiran

Mempunyai tugas mempersiapkan segala perencanaan untuk penunjukan lokasi, perencanaan pembangunan, pengembangan pelayanan, untuk segala pengelolaan serta segala pemeliharaan fisik dari tempat parkir. Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Seksi Perparkiran menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Penyusun rencana dalam program atau kegiatan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan teknis dalam semua bidang pengelolaan, ketertiban dan pelayanan Perparkiran;

---

<sup>56</sup> <https://perhubungan.ponorogo.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>



2. Pengelola ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian umum dan semua keuangan (UPT) Perparkiran;
3. Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPT Perparkiran;
4. Pelaksanaan perijinan penyelenggara dan pembangunan untuk fasilitas perparkiran umum;
5. Penyiapan bahan-bahan untuk koordinasi penentuan suatu titik lokasi fasilitas dari parkir untuk umum;
6. Pengoperasian fasilitas untuk parkir kepentingan umum;
7. Mempersiapkan bahan untuk pengembangan dan pembinaan tentang perparkiran;
8. Pelaksanaan dari pengelolaan retribusi parkir;
9. Pelaksanaan untuk evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan tugas pada bidang perparkiran.<sup>57</sup>

### **C. Peraturan yang Digunakan Dalam Kegiatan Parkir di Kabupaten Ponorogo**

Retribusi parkir di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pendukung besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Retribusi parkir ini adalah iuran secara langsung dan pengguna parkir akan mendapat jasa balik dari pelayanan secara langsung yaitu penataan kendaraan dan fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Namun sebagian masyarakat tidak merasa bahwa iurannya tersebut akan dibalas atau diberikan imbalan secara langsung berupa pelayanan dan kesejahteraan. Pemunggutan retribusi parkir dan retribusi parkir ditepi jalan umum didasarkan pada Undang-

---

<sup>57</sup> <https://perhubungan.ponorogo.go.id/bidang/seksi-perparkiran/>



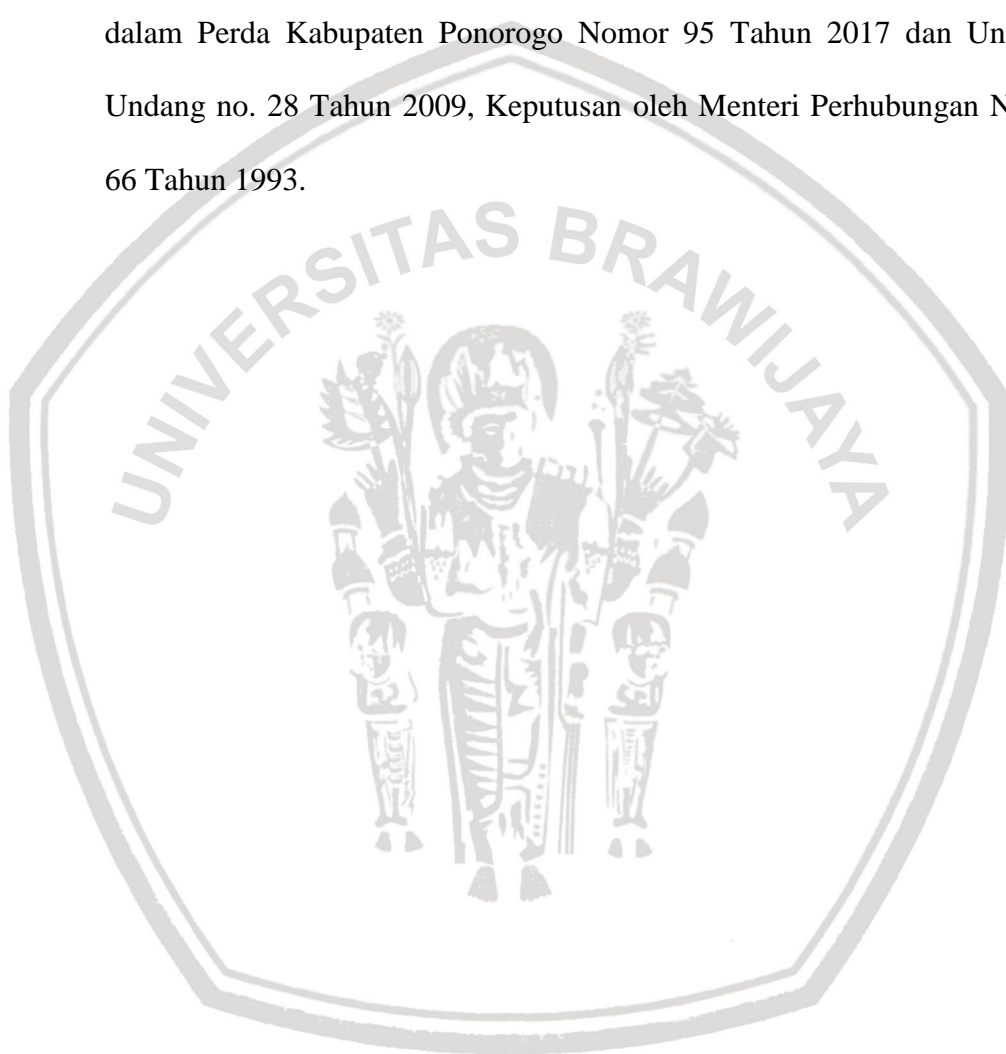
undang dan Peraturan Daerah. Hasil dari punggutan tersebut akan masuk dalam kas daerah.

Di Kabupaten Ponorogo terdapat 153 titik parkir dan 183 juru parkir. Pelaksanaan perparkiran di Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Banyak ditemui juru parkir yang tidak mentaati peraturan yang berlaku di Dinas Perhubungan. Pada kenyataannya banyak juru parkir yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memberi karcis pada pengguna parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir, punggut biaya parkir diatas yang telah ditentukan pemerintah, banyak juru parkir illegal. Penulis membuktikan sendiri pada tanggal 16 juli 2018 di Jln. Soekarno hatta tidak diberikan karcis, tarif yang di minta oleh juru parkir untuk sepeda motor sebesar Rp. 3000, yang seharusnya hanya Rp 1000,- dan mobil Rp. 5000,- yang seharusnya hanya Rp 2000,-. Kejadian tersebut membuktikan bahwa di Kabupaten Ponorogo terdapat banyak juru parkir yang tidak menjalankan tugasnya secara baik dan benar yang sesuai SOP, jauh dari ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Pengaturan atau regulasi tentang retribusi parkir di Kabupaten Ponorogo sangat dibutuhkan. Diperkirakan dengan adanya regulasi tersebut maka retribusi parkir dapat dilaksanakan sesuai harapan. Potensi jumlah kendaraan di Kabupaten Ponorogo dimungkinkan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan di daerah berkembang seperti Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat potensial. Contohnya, dari tahun 2013 kabupaten Ponorogo mulai berdiri gedung- gedung yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh

terhadap penerimaan retribusi parkir seperti Mall Ponorogo City Center dan Keraton. Banyak ditemui café-café dan pusat perbelanjaan lainnya. Hal semacam ini tentunya berpengaruh terhadap ekonomi dan juga social masyarakat.

Peraturan terbaru tentang perparkiran Kabupaten Ponorogo diatur dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 95 Tahun 2017 dan Undang-Undang no. 28 Tahun 2009, Keputusan oleh Menteri Perhubungan Nomer 66 Tahun 1993.



#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1) Manfaat Dari Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo**

Dinas perhubungan Kabupaten Ponorogo berwenang melakukan pungutan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan menganut azas-azas otonomii dan tugas pembantuan di dalam bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

Manfaat retribusi parkir dapat ditentukan berdasarkan target pungutan yang dicapai. Jika realisasi lebih tinggi daripada target maka manfaat dapat dirasakan dan dinilai tinggi dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Target realisasi pungutan retribusi parkir dianggap sebagai pencapaian maksimal dari jumlah pendapatan dari retribusi parkir kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Setelah meninjau kendala dan solusi yang dilaksanakan untuk pengelolaan retribusi parkir bertujuan meningkatkan pendapatan dari sector retribusi parkir.

Dilihat dari data yang penulis peroleh, retribusi parkir tentunya memberi kontribusi dan mendorong penerimaan yang sangat besar terhadap penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Dari tahun ketahun antara target dan realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan yang cukup fantastis walaupun terpampang nyata bahwa retribusi parkir di Kabupaten Ponorogo masih

banyak ditemui penyelewengan-penyelewengan oleh juru parkir maupun masalah pada tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dan pemerintah yang kurang tegas dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan dan menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo untuk kebutuhan pembangunan daerah yang cukup besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pemasukan uang hasil retribusi parkir ke kas daerah lebih tinggi dibandingkan dengan target pertahunnya. Besarnya Kontribusi retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 sebesar Rp 588.452.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu) pemasukan ini diperkirakan 101,46 % dari target retribusi parkir tahun 2014 Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2015-2016 pemasukan hasil retribusi daerah selalu naik atau lebih tinggi dari target retribusi parkir. Pada tahun 2015 sebesar Rp 638.274.000,00 dipresentasikan menjadi 108,18 % dan tahun 2016 sebesar Rp 762.560.000,00 dipresentasikan menjadi 101,67 % dari target yang di tafsir. Sedangkan pada tahun 2017 pemasukan dari retribusi target mengalami penurunan yang drastis, yaitu Rp 451.790.000,00 jika diprosentase 62,32% saja dari target yang ditafsirkan.

Dengan demikian kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan menjadi pemasukan yang cukup besar bagi daerah Kabupaten Ponorogo. Apabila retribusi parkir tersebut

berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka tentunya pendapatan dari sector retribusi parkir semakin besar dan sangat berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang bermanfaat untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Ponorogo.

Prinsip dan sasaran yang digunakan untuk penetapan tarif retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas layanan untuk memperlancar keadaan lalu lintas di jalan. Prinsipnya dan sasarannya dalam menetapkan berapa besarnya tarif retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo harus tetap memperhatikan kecukupan dalam biaya penyediaan untuk marka jalan, rambu parkir, biaya untuk transportasi dalam rangka untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya-biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Tujuan dari suatu prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi ditentukan agar kiranya tarif retribusi parkir dapat meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu penunjang pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Besaran tarif parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir  (Rp)	Keterangan
1.	Sepeda	500	Untuk sekali parkir
2.	Sepeda motor	1000	
3.	Kendaraan roda tiga, sedan, mobil penumpang, jeep, station wagon, pick up dsb	2000	
4.	Truck, bus, mikro bus, dsb.	3000	Untuk sekali parkir
5.	Truck gandeng atau trailer	5000	Untuk sekali parkir

Tabel 1.1 (Struktur dan besaran tarif dari retribusi parkir di tepi jalan umum)



Subjek retribusi parkir kadang kala mengalami kehilangan, kerusakan pada kendaraan ataupun barang - barang yang berada diluar dan didalam kendaraan yang diparkir. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan yang diparkir atau kerusakan/kehilangan barang-barang yang berada diluar dan didalam kendaraan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir kecuali dapat dibuktikan terjadinya kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang yang ada diluar dan didalam kendaraan akibat dari perbuatan petugas parkir. Retribusi tempat khusus parkir adalah tempat pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki maupun dikelola oleh Pemerintah Daerah. Semua orang / badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir diwajibkan membayar iuran wajib tempat khusus parkir. Retribusi tempat khusus parkir dipungut biaya retribusi atas layanan tempat khusus parkir yang telah disediakan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan yang mengelola juga pemerintah di daerah.

Besarnya tariff retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda	500 / sekali parkir
2.	Sepeda motor	1000/sekali parkir
3.	Kendaraan roda tiga, sedan, mobil penumpang, jeep,pick up dll	2000/ sekali parkir
4.	Truck, bus, mikro bus, dsb	3000/ sekali parkir
5.	Truck gandeng atau trailer	5000 / sekali parkir

Tabel 1.2 (Tarif Parkir tempat khusus parkir di Kabupaten Ponorogo)

Prinsipnya dan sasaran yang diharapkan dalam menetapkan struktur dan besar tariff retribusi tempat khusus parkir tentunya didasarkan pada tujuan dan guna mendapatkan keuntungan yang sesuai dan sebagai pengganti biaya atas pengadaan, penataan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan

## 2) Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir

Di Kabupaten Ponorogo banyak dijumpai permasalahan perparkiran dan tentunya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Mulai dari juru parkir yang tidak tertib serta masyarakat yang

kurang kesadaran hukum dan kurang berpartisipasi terhadap kesejahteraan bersama. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018 permasalahan yang terjadi masih sama. Permasalahan yang ada di Kabupaten Ponorogo di sector retribusi parkir pemerintah Kabupaten Ponorogo sampai saat ini belum memiliki ide solutif yang tujuannya untuk mengantisipasi banyaknya penyelewengan retribusi ditingkat pengelola parkir yang selama ini dapat di indikasikan terjadi penyelewengan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk optimalisasi penerimaan retribusi parkir berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Wong, selaku Kasubag Retribusi Parkir Dinas Perhubungan, beliau mengutarakan bahwa, pada saat sekarang ini pihak Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berusaha untuk melakukan berbagai cara pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan, dengan hal inidiharapkan dapat untuk melihat bagaimana pelaksanaan perparkiran sebenarnya yang ada di Ponorogo tersebut, kemudian diupayakan dengan melihat lokasi-lokasi yang telah diyakini terjadi praktek parkir liar. Dengan salah satu tindakannya, pihak Dinas Perhubungan akan mengempeskan ban-ban kendaraan bagi pengendara motor maupun pengendara roda empat yang parkir tidak sesuai lokasi atau sembarangan, maupun juru-juru parkir yang melakukan perparkiran tanpa adanya izin ataupun illegal. Dan ini diharapkan setidaknya akan memberi efek jera baik kepada masyarakat maupun kepada juru parkir. Dari data tahun 2014 sampai tahun 2018

ditemukan penyelewengan dari pihak juru parkir dan pemerintah hanya memproses hokum dengan membawa ke polres namun di polres hanya diberikan penyuluhan tanpa diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang digunakan.

Kemudian berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada narasumber selanjutnya yaitu bapak Sony Hariyanto selaku Kepala Bidang Retribusi Pajak pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo, beliau mengatakan pihak dari pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli dari daerah, seperti dilakukan studi potensi pada lokasi-lokasi mana saja yang dianggap mampu memberi kontribusinya lebih terhadap pemerintah, kemudian pemerintah akan melakukan pemetaan lokasi agar disetiap tempat dapat dipungut retribusi.

Realisasi ataupun pencapaian yang telah didapatkan/diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo kenyataannya sampai saat ini masih belum dapat dianggap maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah penulis dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya dan setidaknya realisasi dari pendapatan sedikit demi sedikit telah mengalami peningkatan dan turun pada tahun 2017 yang berarti dapat dikatakan belum maksimal.

Dari upaya- upaya yang disebutkan oleh berbagai narasumber tersebut, diharapkan dapat memberikan dorongan dan menumbuhkan akan kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah dalam hal rutin melakukan pembayaran wajib retribusi maupun menjalankan tugasnya

dengan baik, sesuai target berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dan apabila upaya-upaya tersebut dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran, maka dapat diprediksi bahwa target Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir tersebut dapat tercapai dengan baik, sesuai rencana dan maksimal.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa agar mendapatkan satu kesatuan dari pengertian dalam penelitian maka penulis telah mengoperasionalkan konsep sebagai berikut:

Upaya yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan-penerimaan retribusi dari parkir untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dengan cara, melakukan segala upaya-upaya untuk penyelesaian hambatan yang dapat menghambat kegiatan perparkiran dan menyelesaikan semua permasalahan yang sedang terjadi dengan berlandaskan pada Undang-undang dan Peraturan daerah yang telah ditentukan dan diatur di dalamnya.

Undang-undang dan peraturan daerah yang dimaksudkan adalah peraturan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Ponorogo terkait retribusi jasa umum dan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Perubahan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 terkait tentang retribusi jasa umum. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan dari Tarif-tarif Retribusi layanan parkir yang berada di tepi jalan umum dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2016 yang memuat



isi suatu kedudukan, struktur organisasi, uraian tugas serta uraian fungsi dan suatu tatanan kerja dari Dinas Perhubungan.

### **3) Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir**

Terdapat beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di daerah yaitu di antaranya :

1. Keterlambatan setoran
2. Banyaknya juru parkir, tidak semua juru parkir yang menjalankan tugasnya sesuai peraturan sehingga tidak efektif dan banyak titik parkir ilegal
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
4. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan.
5. Pelaksanaan dari pemungutan pendapatan yang didapati belum maksimal teratur, baik dan belum sesuai dengan kondisinya yang ada di lapangan.
6. Belum lengkap data base tentang retribusi daerah.
7. Kurang koordinasi dari pihak internal dengan unit kerja yang lain yang melaksanakan atau berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah.
8. Kemampuan dalam perencanaan dan pengawasan terhadap keuangan yang kondisinya lemah. Hal semacam ini tentunya akan mengakibatkan suatu kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.



9. Factor dari kondisi alam yang kenyataannya tidak menentu
10. Masih saja adanya tindakan-tindakan dari premanisme, berupa pemungutan parkir tidak berizin, secara ilegal dengan berbagai alasan.
11. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang objek-obyek retribusi parkir bahwa hal tersebut akan menunjang pendapatan asli dari daerah yang artinya untuk kemakmuran masyarakat itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Manfaat dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai penunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Ponorogo.
- b. Upaya-upaya yang pemerintah Kabupaten Ponorogo lakukan upaya studi potensi dilokasi mana yang dianggap mampu memberi kontribusi lebih terhadap pemerintah daerah, kemudian pemerintah berupaya melakukan pemetaan lokasi agar disetiap tempat dapat dilakukan pemungutan dari retribusi, melihat lokasi-lokasi yang dapat di yakini terjadi praktek-praktek parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan mengempeskan ban-ban dari kendaraan-kendaraan bagi pengendara motor maupun pengendara roda empat yang parkir bukan pada lokasi parkir atau yang parkir sembarangan, melakukan penyuluhan terhadap juru parkir setiap 6 bulan sekali dan melakukan kroscheck lapangan secara langsung.
- c. Hambatan atau masalah pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengupayakan optimalisasi penerimaan retribusi parkir meliputi :
  1. Keterlambatan setoran
  2. Banyaknya juru parkir dan titik parkir illegal
  3. Rendahnya kesadaran masyarakat

4. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan.
5. Belum lengkapnya data base tentang retribusi daerah.
6. Kurang koordinasi antara pihak internal dan dengan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah.
7. Kemampuan dalam merencanakan dan pengawasan keuangan lemah yang mengakibatkan kebocoran yang sangat berpengaruh besar bagi daerah.
8. Ditemukan tindakan-tindakan premanisme, berupa pemungutan dari parkir ilegal dengan berbagai alasan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di utarakan oleh penulis maka penulis ada beberapa saran :

- a. Untuk Juru Parkir
  - a) Juru parkir diharapkan bertanggung jawab, taat pada peraturan yang ditetapkan tentang retribusi pelayanan parkir, dengan menggunakan atribut perparkiran dan berseragam lengkap, memberikan karcis, menata kendaraan dengan rapi.
  - b) Pelaksana parkir atau juru parkir dituntut dan diwajibkan memungut biaya tarif parkir sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan.
- b. Untuk Pengguna Parkir/Masyarakat
  - a) Masyarakat harus ikut serta dalam menertibkan perparkiran dengan menegur jika mendapati juru parkir yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan SOP.

- b) Meminta karcis yang resmi dan tidak mau dipunggut biaya parkir melebihi yang ditentukan dalam peraturan
- c. Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas terkait
  - a) Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta pengawasan langsung ke lapangan, terhadap kegiatan perparkiran yang ada di Kabupaten Ponorogo.
  - b) Pembaharuan dan mengkaji ulang terhadap Peraturan daerah tentang selain itu pemerintah juga diharapkan tegas serta melakukan besarnya tarif pelayanan parkir dan sanksi-sanksi lebih tegas untuk juru parkir apabila melanggar aturan yang berlaku.
  - c) Pemerintah memberi sanksi terhadap juru parkir liar dan harus diproses hukum.
  - d) Melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat agar masyarakat ikut bekerjasama demi terciptanya perparkiran yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - e) Pengelolaan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
  - f) Penyesuaian jumlah petugas yang dibutuhkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Setia Negara, Tunggul. 2017. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press
- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika
- Cholid Narbuko Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah( Jakarta : PT Rineka Cipta
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah
- Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, t.t)
- Kaho, Josep Riwu. 2005. Prospek Otonom Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kusnandi, Moch. dan Saragih, R. Bintan. 2008. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Lukman. H dalam “ Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- Lexy J. Moloeng. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Marzuki. 1983. Metodologi Riset. Yogyakarta : PT. Hanindita Offset
- Muhammad Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Madiasmo.
2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi



- Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Soerjono Soekanto. 2012 Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press
- Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot. P. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana
- Tony Marsyahrul. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Gramedia)
- Yani, Ahmad. 2004. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Zain, Muhammad . 2008. Managemen Perpajakan. Jakarta: Salemba
- Dasar Hukum :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan) Perubahan Ke Empat Atas UU No. 7 Tahun 1983

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi dan Jasa Umum.  
Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan  
Jasa Umum. Butir. 82-85

Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2016 Tentang Retribusi dan Jasa Umum.  
Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi  
dan Jasa Umum. Butir. 81





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 113 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;  
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : Dr. Tunggal Anshari S.N., SH.M.Hum.; Agus Yulianto, SH.MH, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Fitri Yuliani NIM 125010101111109
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Januari 2018

DEKAN

RACHMAD SAFA'AT  
NIP. 196208051988021001





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852  
**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**

Nomor : 072 / 508 / 405.30 / 2018

Berdasarkan surat Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 8 Juni 2018, Nomor : 2856/4N10.F01.01/PP/2018, perihal Pra Survey.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **FITRI YULIANI**  
 Mhs. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Alamat : Dukuh Ngresik RT. 01 RW. 02 Kel/Desa Ngrogung Kec. Ngebel Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research : " Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam /PKL/ Pengumpulan data/Magang Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir "

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : 1. BPPKAD Kab. Ponorogo  
 2. Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Tugas Akhir / Penyusunan Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 2 (Dua) Bulan Mulai Tanggal Surat Dikeluarkan

Bidang Penelitian : Hukum Administrasi Negara

Status Penelitian : Baru

Peserta Penelitian/Survei : -

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Dr. PRIJA DJATMIKA, SH, MS.**  
 Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama Lembaga : Universitas Brawijaya Malang.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada  
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 28 Juni 2018

a.n. PII KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN PONOROGO  
 Kabid. Kesbang

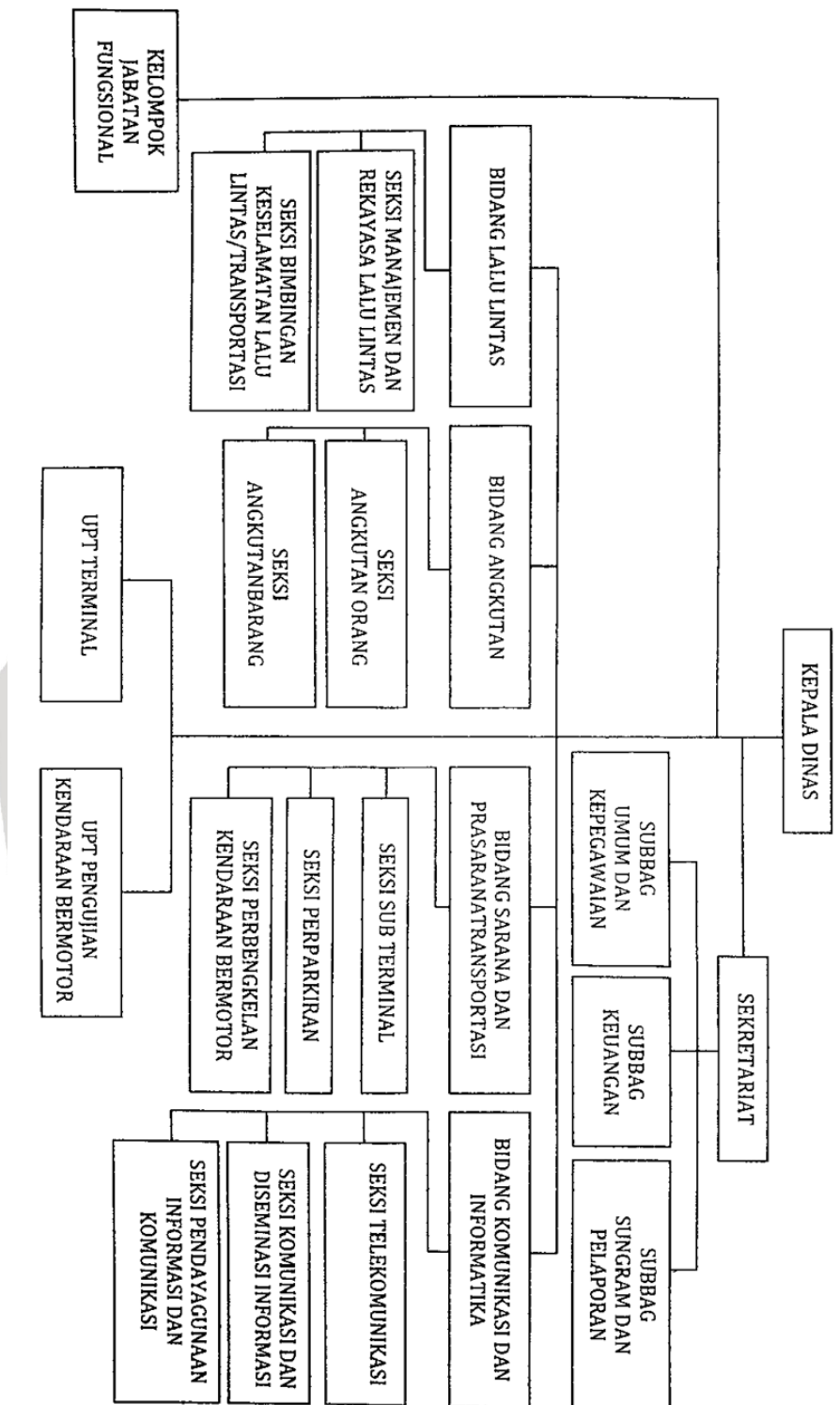
**Tembusan :**

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Brawijaya

**Drs. HERI BASUKI.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19620524 199203 1 005



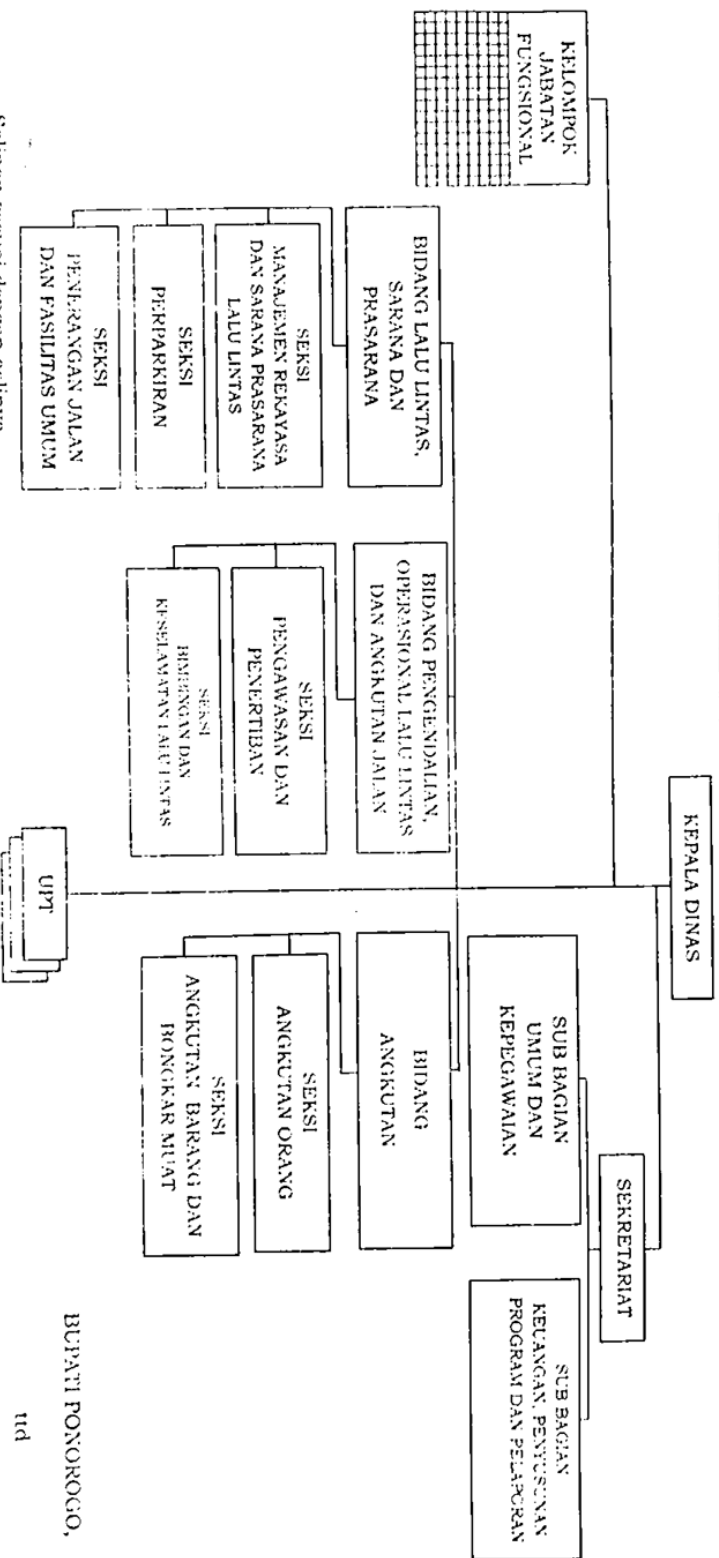
### c. Struktur Organisasi





LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 76 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 19 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN(TIPE B)



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 HENRY SUTRISNO  
 NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,  
 ttd  
 H. IPONG MUCHILISONI

**B. Sarana dan Prasarana****1. Lokasi Titik Parkir****a. Jalan Soekarno Hatta**

Tabel II.2  
Lokasi Titik Parkir Jl. Soekarno Hatta

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Praktek Dokter Puspa/ pagi + Dr. Ruli	2
2	Soto Lamongan dgn gdg bakti/plstik	1
3	Bakso jangkung	2
4	Tk. Daging ACC+ depan eks pengadilan	1
5	Depan Avida Avia Duta	1
6	Tk. Moroseneng - Tk. Morodadi	1
7	Tk. Saerah	1
8	Tk. Prima Jaya / TK Irian	1
9	Tk. Muncul baru - Tk. Mas Bagong	1
10	Tk. Indonesia	1
11	Tk. Mas Dewi - Tk. Roti sekarjaya	1
12	TK. Mas Mahkota candra s/d	1
13	TK. ATOM S/d Omega Jaya	1
14	Buah Pahlawan s/d Tk. Mas Dewi	1
15	Pasar Stasiun sebelah barat jalan	6
16	Ruko Jarakan	1
17	Tk. ACC	1
18	Depan Pasar Stasiun	1
19	Depan Patung Macan + Bakso Ramayana	1
20	Tk. Murni II ( Jl. Tamrin)	1
21	Tk. Sinar Jaya s/d nasipecel	1
22	NasiPecel Jl. Dr. Sutomo	2
23	Tk. Sampurna	1
24	Tk. Harapan	2
25	Tk. Buku Latansa	2
26	Swalayan Surya dan Langgeng	2
27	Populer	1
28	Tk. Sumber murni	1
29	Tk. Buku Pahlawan	1
30	Tiga Berlian motor	1
31	PKL Utara Pertigaan Ngepos	1
32	BTN Ponorogo	1

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR
33	Apotik Rizky	1
34	Pasar Stasiun	1
35	Rajawali Komputer	1
36	Mbok Rah	2
JUMLAH		47

Sumber : Bidang Sarana Prasarana

b. Jalan KH. A. Dahlan

Tabel II.3  
Lokasi Titik Parkir Jl. KH. A. Dahlan

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Semar	1
2	Tk. Inti Aroma	1
3	Tk. Ratna sari	1
4	Luwes	4
5	Global Komputer	1
JUMLAH		8

Sumber : Bidang Sarana Prasarana

c. Jalan Sultan Agung

Tabel II.4  
Lokasi Titik Parkir Jl. Sultan Agung

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Pos Mode	6
2	Tk. Dunia Elektronik + Angringan	1
3	Tk. Kharisma	1
4	Putra Sala dan Swalayan Mitra	1
5	Putra Saladan Tk. Mainan	1
6	Bembi	1
7	Joglomanis	1
8	Cirlo Steak+ Bubur ayam dpn ma'arif	1
9	Matta Komputer	1
10	Bebek Goreng Dpn Joglo	1
11	Dunia mainan	1
12	Griya Laptop	1
13	Depot martini	1
14	Latare cafe/maret	1

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR
JUMLAH		19

Sumber : Bidang Sarana Prasarana

d. Jalan Diponegoro dan Jalan Trunojoyo

Tabel II.5  
Lokasi Titik Parkir Jl. Diponegoro dan Jl. Trunojoyo

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Tk. Bima Motor - Depan RSU Aisyah	1
2	Tk. Angkasa Motor	1
3	Sumber Makmur	1
4	Tk. Keramik-Salon iin	1
5	Dinamika ternak	1
6	Tk. Sinar Gemilang	1
7	Artomoro celuler	1
8	Apotik KaryaHusada	1
9	Toko Sumber Jaya-Depot AyamBakar	1
10	Nasi Pecel sekayu	1
11	Soto seger tambakbayan	1
12	Tk. Al Faroq	1
13	Sami Lumayan	1
14	Mie Ayam Pak Mo Barat Aloon-Aloon	1
15	Salon iin	1
16	Nasi Pecel	1
JUMLAH		16

Sumber : Bidang Sarana Prasarana

e. Jalan Gajah Mada

Tabel II.6  
Lokasi Titik Parkir Jl. Gajah Mada

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Tk. Angkasa	2
2	Queen salon	1
3	Tk. Pemuda motor	1
4	Tk. Gatut koco s/d Kurnia diesel	2
5	Tk. Murah	1
6	Ruko BCA	2

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
7	Depan BCA s/d Agusjayafoto II,	1
8	Roda 4 Taman Depan BCA	1
9	TK. Raya - TK. Jaya Saksi	1
10	TK. Kurnia Diesel s/d TK. Kurnia Material	1
11	TK. Laris Manis	1
12	TK. Gatut Koco s/d Kurni Diesel	1
13	Ruko Ngepos	2
14	Bank. Danamon	1
15	Tk. Semangat dan Bakso mandala	1
16	Soto Terate Bu Sunar + tk. Bajuagya	1
17	Pasar Tonatan	1
18	Tk. Nabila	1
19	Tk. Lancar jaya	1
20	Depan STMJ	1
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>

Sumber :Bidang Sarana Prasarana

- f. Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Bayangkara, danJalan J.A. Suprpto

Tabel II.7  
Lokasi Titik Parkir Jl. Urip Sumoharjo,  
Jl. Bayangkara, dan Jl. J. A. Suprpto

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Tk. Sri Rejeki - Tk. Sinar muda	1
2	Toko Obat Asia dan tk Slamet	1
3	Tk. Kesayangan - Tk. Sepeda	1
4	BRI Unit 1	1
5	Tk. Aries – Tk Telaga Intan	1
6	Tk. Pojok Jaya	1
7	Es Teler Pojok	1
8	UD. Juned	1
9	Bakso Om Jimny	1
10	Bakmi Basman	1
11	Permato Bundo	1
12	Soto lamongan	1
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>

Sumber :Bidang Sarana Prasarana



g. Jalan Jenderal Sudirman

Tabel II.8  
Lokasi Titik Parkir Jl. Jenderal Sudirman

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Tk. Matahari - Sate Gule	1
2	Tk. Indah aneka	1
3	Tk. Tosanadan Tk. Sumber Murni	1
4	Tk. Niki motor s/d Tk. Tas Lumayan	1
5	Tk. Makmur + CPS	1
6	Tk. Matahari - Depot madiun	1
7	Tk. Abadi	1
8	Tk. Sami Jaya	1
9	Sate Guledepan DPD Golkar + soto	1
10	Tk. Agung , Tk. Sopii Martin	1
11	BRI Sarpon	1
12	Toko Jeny + Depot Jeruksing+ warung Bu Man	1
13	Adira	1
14	Soto Ali	1
15	BRI Jend. Sudirman	1
16	ApotikBening	1
17	Depan Nusa Motor	1
18	Soto BorangAloon-Aloon	1
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>

Sumber :Bidang Sarana Prasarana

h. Jalan Gatot Subroto

Tabel II.9  
Lokasi Titik Parkir Jl. Gatot Subroto

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Tk. Talang Agung	1
2	Tk. Tosana	1
3	Tk. Besi Muda Makmur	1
4	Tk. An Motor	1
5	Dr. Anita	1
6	Tk. Sumber sehat s/d Baru Motor	1
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>

Sumber :Bidang Sarana Prasarana

i. Aloon Aloon

Tabel II.10  
Lokasi Titik Parkir Jl. Aloon Aloon

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Jagung Bakar Jl. Aloon-AloonTimur	2
2	Aloon-aloon Timur	1
3	Dpn Pemkab Jl. Aloon-Aloon Utara	1
4	Aloon-aloon Timur ( Siang )	1
5	Es oyena loon-aloon+tirtowening	1
6	Pintu keluar pendopo	1
JUMLAH		7

Sumber :Bidang Sarana Prasarana

j. Luar Kota

Tabel II.11  
Lokasi Titik Parkir Luar Kota

NO	LOKASI	JUMLAH JUKIR (2016)
1	Pasar Somoroto	7
2	Pasar Hewan Jetis	1
3	Swalayan surya balong	1
4	Sawoo	1
5	Pulung	1
6	Kesugihan	1
7	Slahung	1
8	Bungkal	1
9	Badegan	1
10	Sooko	1
11	BRI Balong	1
12	BRI Jenangan	1
13	Soto borang setono	1
14	PasarBalong	1
15	Bungkal	1
16	Teras BRI Ngumpul balong	1
17	Ngebel	1
18	Slahung	1
19	Somoroto	1
20	Dpn. Toko Sepatu / PS. Sumoroto	1
JUMLAH		26

Sumber :Bidang Sarana Prasarana

## A. Realisasi Pendapatan Tahun 2013

Tabel VII.2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran 2013

Kode Rekening	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target 2013 (Rp.)	Realisasi 2013 (Rp.)	%
412010203	Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan Terminal	17.325.000	13.295.000	76,74
412010501	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	580.000.000	588.452.000	101,46
412010701	Pengujian Kendaraan Bermotor	308.000.000	330.537.000	107,32
412011102	Retribusi MCK Terminal	17.280.000	17.280.000	100,00
412011301	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000	1.185.889.701	148,24
412020119	Retribusi Pertokoan di Terminal	1.232.000	1.235.000	100,24
4120204	Retribusi Terminal	279.750.000	273.052.000	97,61
412020401	Terminal Seloaji	174.000.000	167.230.000	96,11
412020402	Terminal Cargo/Ijin Khusus	90.000.000	90.057.000	100,06
412020403	Sub Terminal	15.750.000	15.765.000	100,10
4120205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.000.000	72.670.000	100,00
412020507	Terminal Seloaji	19.500.000	20.810.000	106,72
412020508	Insidentil	32.500.000	51.860.000	159,57
412020602	Retribusi Pemakaian Penginapan Terminal	5.400.000	5.400.000	100,00
4120304	Retribusi Izin Trayek	18.000.000	14.401.000	80,01
Jumlah		2.078.987.000	2.502.161.701	120,35

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan

## B. Realisasi Pendapatan Tahun 2014

Tabel VII.3  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran 2014

Kode Rekening	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target 2014 (Rp.)	Realisasi 2014 (Rp.)	%
412010203	Retribusi Pelayanan sampah/Kebersihan Terminal	17.325.000	13.865.000	80,03
412010501	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	590.000.000	638.274.000	108,18
412010701	Pengujian Kendaraan Bermotor	308.000.000	349.343.200	113,42
412011102	Retribusi MCK Terminal	50.000.000	50.000.000	100,00
412011301	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	850.000.000	1.131.237.566	133,09
412020119	Retribusi Pertokoan di Terminal	1.232.000	1.050.000	85,23
4120204	Retribusi Terminal	279.750.000	261.335.000	93,42
412020401	Terminal Seloaji	174.000.000	154.645.000	88,88
412020402	Terminal Cargo/IjinKhusus	90.000.000	90.790.000	100,88
412020403	Sub Terminal	15.750.000	15.900.000	100,95
4120205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	62.000.000	82.320.000	132,77
412020507	Terminal Seloaji	19.500.000	17.720.000	90,87
412020508	Insidentil	42.500.000	64.600.000	152,00
412020602	Retribusi Pemakaian Penginapan Terminal	6.500.000	6.500.000	100,00
4120304	Retribusi IzinTrayek	15.000.000	10.546.000	70,31
Jumlah		2.179.807.000	2.544.470.766	116,73

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan

### C. Realisasi Pendapatan Tahun 2015

Tabel VII.4  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target 2015 (Rp.)	Realisasi 2015 (Rp.)	%
412010203	Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan Terminal	14.205.000	14.983.000	105,48
412010501	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	762.560.000	101,67
412010701	Pengujian Kendaraan Bermotor	312.997.400	377.931.700	120,75
412011102	Retribusi MCK Terminal	50.000.000	50.000.000	100,00
412011301	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-
412020119	Retribusi Pertokoan di Terminal	1.232.000	40.000	3,25
4120204	Retribusi Terminal	255.750.000	250.553.000	97,97
412020401	Terminal Seloaji	150.000.000	146.933.000	97,96
412020402	Terminal Cargo/Ijin Khusus	90.000.000	87.720.000	97,47
412020403	Sub Terminal	15.750.000	15.900.000	100,95
4120205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	64.900.000	86.500.000	
412020507	Terminal Seloaji	9.900.000	4.300.000	43,43
412020508	Insidentil	55.000.000	82.200.000	149,45
412020602	Retribusi Pemakaian Penginapan Terminal	6.500.000	6.500.000	100,00
4120304	Retribusi Izin Trayek	10.500.000	11.362.000	108,21
Jumlah		1.411.084.400	1.478.229.700	104,76

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan

#### D. Realisasi Pendapatan Tahun 2016

Tabel VII.5  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
412010203	Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan Terminal	15.252.000	15.079.000	98,87
412010501	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	725.000.000	451.790.500	62,32
412010701	Pengujian Kendaraan Bermotor	384.275.000	555.374.800	144,53
412011102	Retribusi MCK Terminal	50.000.000	50.000.000	100
412011301	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-
412020119	Retribusi Pertokoan di Terminal	1.350.000	-	-
4120204	Retribusi Terminal	263.325.000	204.059.900	77,49
412020401	Terminal Seloaji	147.000.000	138.815.900	94,43
412020402	Terminal Cargo/Ijin Khusus	99.000.000	60.234.000	60,84
412020403	Sub Terminal	17.325.000	5.010.000	28,92
4120205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-
412020507	Terminal Seloaji	-	-	-
412020508	Insidentil	75.000.000	67.400.000	89,87
412020602	Retribusi Pemakaian Penginapan Terminal	6.500.000	6.500.000	100,00
4120304	Retribusi Izin Trayek	10.500.000	18.334.000	174,61
				8
Jumlah		1.531.500.000	1.368.538.200	89,38

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENDAPATAN PENGKELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
Jln. Aboon-Aboon Utara No. 3 Lantai II Gedung Gedung Kuda Putih Telp. 0351-481612  
PONOROGO

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
PERIODE BULAN : DESEMBER 2015

NO.	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	SISA
				SD BULAN LAJ	BULAN INI	SD BULAN INI		
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	199.120.659.301.16	188.805.784.454.41	21.906.831.810.69	210.712.616.265.10	105.82	(11.591.956.963.94)
2	411	PAJAK DAERAH	43.604.700.000.00	47.127.201.142.00	3.768.075.644.00	50.895.226.786.00	116.72	(7.290.526.786.00)
3	41101	PAJAK HOTEL	440.000.000.00	681.708.670.90	66.737.368.00	748.445.988.00	170.10	(308.445.988.00)
4	4110109	- Hotel Melati	420.000.000.00	660.384.620.80	64.412.368.00	724.796.988.00	172.57	(304.796.988.00)
5	4110112	- Losmen / Rumah Penginapan	20.000.000.00	21.324.000.00	2.325.000.00	23.649.000.00	118.25	(3.649.000.00)
6	41102	PAJAK RESTORAN	1.575.000.000.00	1.957.264.596.00	591.054.469.00	2.548.319.065.00	161.80	(973.319.065.00)
7	4110201	- Restoran	300.000.000.00	491.791.649.00	64.617.180.00	556.408.829.00	185.49	(256.468.829.00)
8	4110205	- Penyajian	1.250.000.000.00	1.439.943.947.00	524.167.289.00	1.964.106.236.00	157.13	(714.106.236.00)
9	4110206	- Warung	25.000.000.00	25.529.000.00	2.215.000.00	27.744.000.00	110.98	(2.744.000.00)
10	41103	PAJAK Hiburan	577.200.000.00	983.993.801.00	62.390.545.00	1.046.384.346.00	181.29	(469.184.346.00)
11	4110301	- Bioskop	240.000.000.00	470.179.667.00	30.394.167.00	500.573.834.00	208.57	(260.573.834.00)
12	4110307	- Karaoke	230.000.000.00	271.507.884.00	27.377.128.00	298.880.012.00	129.95	(68.880.012.00)
13	4110321	- Pajak Hiburan Han Raya	22.200.000.00	25.357.500.00	25.357.500.00	25.357.500.00	114.22	(3.157.500.00)
14	4110323	- Pajak Hiburan Insidentil	85.000.000.00	216.948.750.00	4.624.250.00	221.573.000.00	260.67	(136.573.000.00)
15	41104	PAJAK REKLAME	830.000.000.00	899.083.330.00	53.244.650.00	952.327.980.00	114.74	(122.327.980.00)
16	4110401	- Papan Nama / Billboard	700.000.000.00	748.066.645.00	47.156.250.00	805.222.895.00	115.03	(105.222.895.00)
17	4110402	- Umbul2, Spanduk, Balho dan Film	130.000.000.00	141.016.685.00	6.088.400.00	147.105.085.00	113.16	(17.105.085.00)
18	41105	PAJAK PENERANGAN JALAN	14.750.000.000.00	15.529.472.384.00	1.563.478.525.00	17.092.950.909.00	115.88	(2.342.950.909.00)
19	4110501	- Penerangan Jalan Pelanggan PLN	14.750.000.000.00	15.529.472.384.00	1.563.478.525.00	17.092.950.909.00	115.88	(2.342.950.909.00)
20	41106	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	177.500.000.00	256.422.022.00	74.114.475.00	330.536.497.00	191.62	(158.036.497.00)
21	4110604	- Batu Kapur	22.500.000.00	19.825.581.00	3.778.500.00	23.604.081.00	104.91	(1.104.081.00)
22	4110606	- Batu Kali / Andesit / Pasir	150.000.000.00	236.596.441.00	70.335.975.00	306.932.416.00	204.62	(156.932.416.00)
23	41107	PAJAK PARKIR	130.000.000.00	178.208.700.00	18.175.630.00	196.384.330.00	151.06	(66.384.330.00)
24	4110701	- Parkir	130.000.000.00	178.208.700.00	18.175.630.00	196.384.330.00	151.06	(66.384.330.00)

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENDAPATAN PENGKELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
Jln. Aloon-Aloon Utara No. 3 Lantai II Gedung Graha Krada Praja Telp. 0351-481612  
PONOROGO

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
PERIODE BULAN : DESEMBER 2016

NO.	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				%	SISA
				S/D BULAN LAJU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	223.153.365.041.00	211.484.874.606.87	23.205.180.551.09	234.690.055.157.96		105.17	(1.536.660.116.96)
2	411	PAJAK DAERAH	53.832.060.000.00	57.874.281.101.00	5.284.828.644.00	63.159.109.745.00		117.33	(9.327.049.745.00)
3	41101	PAJAK HOTEL	760.000.000.00	856.279.829.00	80.964.078.00	937.243.907.00		123.32	(177.243.907.00)
4	4110109	- Hotel Meleat	740.000.000.00	832.088.729.00	75.830.338.00	907.919.067.00		122.69	(167.919.067.00)
5	4110112	- Losmen / Rumah Penginapan	20.000.000.00	24.191.100.00	5.133.740.00	29.324.840.00		146.62	(9.324.840.00)
6	41102	PAJAK RESTORAN	2.495.000.000.00	3.044.836.444.00	837.401.754.00	3.882.238.198.00		155.60	(1.387.238.198.00)
7	4110201	- Restoran	680.000.000.00	831.789.586.00	85.301.117.00	917.090.703.00		134.87	(237.090.703.00)
8	4110205	- Penyajian	1.800.000.000.00	2.195.866.658.00	751.352.257.00	2.947.219.115.00		163.73	(1.147.219.115.00)
9	4110206	- Warung	15.000.000.00	17.180.000.00	748.380.00	17.928.380.00		119.52	(2.928.380.00)
10	41103	PAJAK HIBURAN	1.064.560.000.00	1.144.486.619.00	68.912.950.00	1.213.399.569.00		113.98	(148.839.569.00)
11	4110301	- Bioskop	680.000.000.00	688.412.670.00	37.995.084.00	806.407.754.00		118.59	(126.407.754.00)
12	4110307	- Karaoke	270.000.000.00	259.801.586.00	28.042.416.00	287.844.012.00		106.61	(17.844.012.00)
13	4110321	- Pajak Hiburan Han Raya	24.560.000.00	25.632.000.00	-	25.632.000.00		104.36	(1.072.000.00)
14	4110323	- Pajak Hiburan Insidentil	90.000.000.00	90.640.353.00	2.875.450.00	93.515.803.00		103.91	(3.515.803.00)
15	41104	PAJAK REKLAME	920.000.000.00	951.251.201.00	76.758.400.00	1.028.009.601.00		111.74	(108.009.601.00)
16	4110401	- Papan Nama / Billboard	800.000.000.00	840.124.624.00	63.426.200.00	903.550.824.00		112.94	(103.550.824.00)
17	4110402	- Umbul2, Spanduk, Ballo dan Film	120.000.000.00	111.126.577.00	13.332.200.00	124.458.777.00		103.72	(4.458.777.00)
18	41105	PAJAK PENERANGAN JALAN	17.000.000.000.00	17.003.064.292.00	1.608.154.973.00	18.611.219.265.00		109.48	(1.611.219.265.00)
19	4110501	- Penerangan Jalan Pelanggan PLN	17.000.000.000.00	17.003.064.292.00	1.608.154.973.00	18.611.219.265.00		109.48	(1.611.219.265.00)
20	41106	PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM DAN BATUAN	522.500.000.00	575.387.859.00	99.367.857.00	674.755.716.00		129.14	(152.255.716.00)
21	4110604	- Batu Kapur	22.500.000.00	14.194.228.00	838.700.00	15.032.928.00		66.81	(7.467.072.00)
22	4110606	- Batu Kali / Andesit / Pasir	500.000.000.00	561.193.631.00	98.529.157.00	659.722.788.00		131.94	(159.722.788.00)
23	41107	PAJAK PARKIR	220.000.000.00	213.224.800.00	16.712.500.00	229.937.300.00		104.52	(9.937.300.00)
24	4110701	- Parkir	220.000.000.00	213.224.800.00	16.712.500.00	229.937.300.00		104.52	(9.937.300.00)





BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

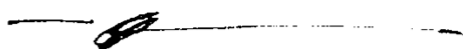
BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 20-12-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO



AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 95



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Tersebut, Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1


Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Tersebut, Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 19 DEC 2017  
BUPATI PONOROGO,



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DEC 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	KELOMPOK OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
I.	YANG BERSIFAT RUTIN/TETAP :		
1	Sepeda	500,00	Untuk sekali parkir
2	Sepeda Motor	1.000,00	
3	Kendaraan Roda Tiga, Sedan, mobil penumpang, jeep, station wagon, pick up, dan sejenisnya (JBB < 3.500)	2.000,00	
4	Truck, bus, mikro bus dan sejenisnya (JBB 3.500 sampai dengan 15.000)	3.000,00	
5	Truck gandeng atau trailer (kendaraan JBB > 15.000)	5.000,00	
II	YANG BERSIFAT INSIDENTIL :		
1	Sepeda	500,00	Untuk sekali parkir
2	Sepeda Motor	2.000,00	
3	Kendaraan Roda Tiga, Sedan, mobil penumpang, jeep, station wagon, pick up, dan sejenisnya (JBB < 3.500)	3.000,00	
4	Truck, bus, mikro bus dan sejenisnya (JBB 3.500 sampai dengan 15.000)	5.000,00	
5	Truck gandeng atau trailer (kendaraan JBB > 15.000)	7.000,00	

BUPATI PONOROGO,  
H. IPOM MUCHLISSONI